

M.H. LUKMAN

TENTANG
FRONT
PERSATUAN
NASIONAL



NASIONAL
BERSATUAN
FRONT
TENTANG

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH !

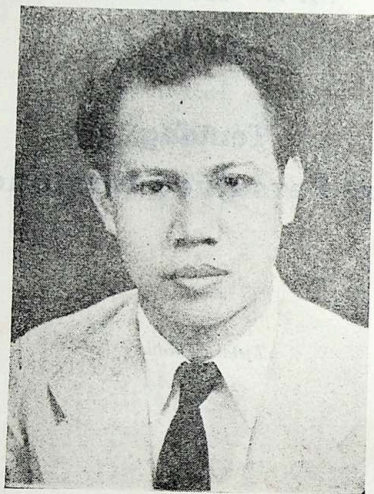
M. H. LUKMAN

**Tentang
Front Persatuan Nasional**

Tjetakan kedua



Jajasan „Pembaruan“
Djakarta 1962



P E N G A N T A R

Seperti dinjatakan pada penutupnja, isi brosur ini adalah suatu uraian jang diharapkan bisa membantu untuk lebih memahami apa jang dimaksudkan dengan front persatuan nasional oleh kaum Komunis. Front persatuan nasional bagi kaum Komunis adalah djalan untuk menjapai baik Pemerintah Gotongrojong maupun Pemerintah Demokrasi Rakjat. Oleh karena itu, isi brosur ini pada pokoknja merupakan pendjelasan mengenai rumusan front persatuan nasional didalam Program PKI jang berbunyi: „Hanja suatu front persatuan nasional jang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat jang se-luas²nja dan perdjuaan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rakjat menudju kemenangannja”.

Sudah beberapa waktu lamanja isi brosur ini mendjadi bahan peladjaran tentang front persatuan nasional di Sekolah² Partai dipusat dan di-daerah² tingkat I. Ia disusun oleh Kawan M.H. Lukman, Wakil Ketua I CC PKI, sebagai diktat untuk mata peladjaran front persatuan nasional. Oleh karena itu, sebagai diktat ia telah lama diketahui dan dipeladjadi oleh sebagian dari kader² Partai.

Tetapi sekarang dengan diterbitkannja diktat ini mendjadi brosur, terbukalah kesempatan untuk membatja dan mempeladjarinja bukan sadja bagi kader² dan anggota² Partai tetapi djuga bagi umum. Semakin luas isi brosur ini dipeladjadi dan difahami oleh kader² dan anggota² Partai dan orang² diluar Partai, semakin baik. Sebab hal ini berarti lebih memberikan sjarat² untuk diwujudkannja front persatuan nasional itu didalam praktek.

Bagi kader² dan anggota² Partai, semakin mercka mengerti tentang pentingnja arti front persatuan nasional dan tentang sjarat² daripada front persatuan nasional, semakin bisa diharapkan bahwa mereka akan mendjadi lebih tekun dan lebih teguh lagi didalam perdjuaan untuk mewujudkan front persatuan nasional itu didalam praktek.

Sebaliknya, bagi orang² diluar Partai jang berkemauan baik, semakin mereka mengerti apa jang sesungguhnya dimaksudkan dengan front persatuan nasional oleh kaum Komunis, tentunja semakin dapat diharapkan bahwa kalaupun tidak turut aktif didalam perdjuaan mewujudkan front persatuan nasional, se-kurang²nja mereka tidak lagi turut² dengan kaum reaksioner memfitnah politik front persatuan nasional dari Partai Komunis. Pendeknja, dengan lebih memahami isi brosur ini diharapkan bahwa orang² diluar Partai jang banjak sedikitnja sudah ambil bagian dalam penggalangan front persatuan nasional akan mendjadi lebih aktif lagi didalam memberikan sumbangannja bagi terwujudnja front persatuan nasional; sedangkan bagi mereka jang tadinja mempunyai purbasangka djelek terhadap politik front persatuan nasional dari kaum Komunis diharapkan bisa menghilangkan atau sedikitnja mengurangi purbasangka itu.

Tertjapainja pengertian jang tepat dan lebih dalam mengenai front persatuan nasional dikalangan kader dan anggota Partai dan dikalangan orang² diluar Partai berarti suatu kemenangan bagi perdjuaan menggalang front persatuan nasional itu sendiri. Dibrosurkannya dik-
tat Tentang Front Persatuan Nasional adalah djustru untuk mentjapai maksud ini.

Demikianlah, semoga penerbitan brosur ini akan mentjapai maksudnja.

Dep. Front Persatuan CC PKI

Djakarta, Djuni 1960.

Sembojan front persatuan nasional telah mendjadi buah bibir se-hari² dikalangan kita kaum Komunis dan dikalangan gerakan Rakjat pekerdja pada umumnya. Pada setiap penutup rapat umum dimana berbitjara orang Komunis atau pemimpin² gerakan Rakjat progresif lainnja, begitu djuga dalam pernyataan² tertulis, selalu diserukan sembojan² jang bersangkutan dengan front persatuan nasional.

Ini adalah baik, karena sembojan front persatuan nasional adalah sembojan jang benar dan baik. Terlaksananya sembojan front persatuan nasional dalam praktek mendjadi sjarat jang menentukan bagi kemenangan kita dalam perdjjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia jang penuh. Semakin populer sembojan ini dikalangan Rakjat semakin baik. Oleh karena itu, mempropagandakan dan menjerukan sadja sembojan front persatuan nasional dikalangan Rakjat sudahlah merupakan kebaikan.

Bagi mereka jang sungguh² berkemauan dan bermaksud baik, mempropagandakan dan menjerukan sembojan front persatuan nasional berarti djuga dorongan dan peringatan bagi diri mereka sendiri untuk berbuat sesuai dengan sembojan jang diserukannya, jaitu berusaha supaya sembojan front persatuan nasional itu tidak tinggal dalam omongan belaka, melainkan mendjadi kenjataan dalam praktek.

Djika orang bermaksud menipu Rakjat dengan menggunakan sembojan jang baik ini, hal inipun tidak akan menguntungkan baginja. Sebab dengan sembojan² atau andjuran² jang benar dan baik, Rakjat akan bisa djuga lebih dipertjepat dan ditingkatkan kesedarannya untuk mengudji perbuatan seseorang dengan omongannya. Orang jang bermaksud menipu Rakjat dengan menggunakan sembojan² atau andjuran² jang baik berarti semakin mempertjepat membukakan kepalsuannya sendiri dimata Rakjat.

Pendeknja, mempropagandakan dan menjerukan sembojan² atau andjuran² jang benar, bagaimanapun djuga, adalah perbuatan jang baik.

Meskipun demikian, didalam praktek sampai sekarang kita masih sering mengalami kesukaran dan rintangan² serta kesalahan², jang djustru datangnja dari kalangan kita sendiri, dalam melaksanakan sembojan front persatuan nasional. Sudah tentu sebab dari semuanya ini bukanlah karena kurang atau tidak adanja ke-sungguh²an dari fihak kita sendiri didalam mempropagandakan dan melaksanakan sembojan front persatuan nasional itu.

Djadi, dimanakah letak sebabnja?

Sebab jang terutama ialah terletak pada kekurangan pengertian kita mengenai teori dari front persatuan nasional sebagai garis politik atau taktik Partai.

Lebih dulu perlu diperingatkan bahwa pemakaian istilah taktik disini samasekali bukanlah dalam arti kata muslihat jang mengandung tipuan, sebagaimana biasanja dipakai dalam pertjakapan se-hari², terutama dikalangan orang² diluar kaum Komunis. Apa jang dimaksudkan dengan taktik oleh kaum Komunis samasekali bukanlah soal tipu-muslihat atau gerak-tipuan. Jang dimaksudkan dengan taktik, djelasnja, taktik Partai, ialah „garis politik dari Partai” (Lenin). Taktik Partai ditetapkan” berdasarkan penilaian jang tenang dan se-mata² objektif atas semua kekuatan² klas disesuatu negara (dan di-negara² tetangga dan semua negara didunia) dan djuga atas pengalaman gerakan² revolusioner” (Lenin).

Rintangan² dan kesalahan² jang datangnja dari kita sendiri dalam melaksanakan garis politik front persatuan nasional haruslah kita hapuskan atau se-tidak²nja kita kurangi sampai pada batas minimum. Untuk ini kita perlu mempeladjadi teori dari politik front persatuan nasional.

Tetapi djika kita nanti sudah mengerti teori dari politik front persatuan nasional, maka hal ini tidaklah berarti bahwa kita terus dengan sendirinja akan bisa dengan gampang dan tepat melaksanakan politik front persatuan nasional itu. Ketjakapan dan ketepatan kita dalam mendjalankan politik front persatuan nasional, sesudah kita banjak-sedikitnja mengerti teorinja, terutama akan kita peroleh dari pekerdjaan praktek se-hari². Djadi, djuga dalam hal ini kita tetap berpegang pada prinsip satunja teori dengan praktek.

Tetapi bagaimanapun djuga, dengan pengertian jang lebih dalam dan tepat mengenai teori dari politik front

persatuan nasional, dapatlah diharapkan bahwa akan timbul dorongan yang lebih besar pada kita untuk lebih sungguh² dan lebih tekun lagi didalam menjalankan politik front persatuan nasional. Karena dari pengertian teori ini kita akan menjadi lebih sadar tidak saja akan pentingnja dan keharusan kita menjalankan politik front persatuan nasional, tetapi juga akan kesulitan²nja yang berbagai matjam.

Dengan dorongan ke-sungguh²an dan ketekunan yang lebih besar, yang didapatkan dari pengertian teori, maka dapatlah ditimbulkan aktivitas dan daya-upaja serta kesabaran yang lebih besar lagi dalam menjalankan politik front persatuan nasional. Dengan demikian, berartilah kita menjiptakan sjarat² untuk bisa meningkatkan ketjapakan dan ketepatan kita dalam menjalankan garis politik front persatuan nasional, dan mengurangi rintangan² ideologis serta kesalahan² sampai pada batas minimum dari pihak kita sendiri.

Ada lima pokok persoalan dari front persatuan nasional yang kita bitjarakan dibawah ini, yaitu:

Pertama, soal ide yang menjadi dasar atau melahirkan politik front persatuan nasional, ialah soal perbedaan revolusi dinegeri djadjahan dan dinegeri imperialis.

Kedua, soal basis dari front persatuan nasional, ialah soal persekutuan buruh dan tani.

Ketiga, soal kebebasan Partai Komunis dalam front persatuan nasional.

Keempat, faktor agama dan sukubangsa dalam front persatuan nasional.

Kelima, soal organisasi front persatuan nasional.

1. PERBEDAAN REVOLUSI DINEGERI DJADJAHAN DAN DINEGERI IMPERIALIS

Dasar dari politik front persatuan nasional, atau ide yang melahirkan politik front persatuan nasional ialah pendirian Leninis yang membedakan revolusi dinegeri imperialis dengan revolusi dinegeri djadjahan dan negeri tergantung.

Dalam laporannja tentang masalah nasional dan kolonial pada Kongres Kedua Komintern, Lenin ada mengatakan: „Apakah ide yang paling penting dan pokok dari

tesis kita? Ide itu ialah perbedaan antara bangsa² tertindas dan bangsa² penindas. Kita menekankan perbedaan ini, tidak seperti Internasionale Kedua”.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lenin ini, Stalin memberikan penjelasan bahwa : „Adalah suatu *perbedaan* yang tegas antara revolusi di-negeri² imperialis, negeri² yang menindas bangsa² lain, dan revolusi di-negeri² djadjan dan negeri² tergantung, negeri² yang menderita penindasan imperialis dari negara² lain. Revolusi di-negeri² imperialis adalah satu soal: di-negeri² itu burdjuasinja adalah penindas bangsa² lain; ia adalah kontra-revolusioner dalam segala tingkatan dari revolusi; *elemen nasional*, sebagai suatu elemen didalam perdjuaan untuk emansipasi, tidak terdapat di-negeri² ini. Revolusi di-negeri² djadjan dan negeri² tergantung adalah soal lain: di-negeri² ini penindasan yang dilakukan oleh imperialisme negara² lain adalah salahsatu faktor dari revolusi; penindasan ini tidak boleh tidak mengenai burdjuasi nasional juga; burdjuasi nasional, pada tingkatan tertentu dan untuk masa tertentu, bisa menjokong gerakan revolusioner dinegerinja melawan imperialisme, dan elemen nasional, sebagai suatu elemen didalam perdjuaan untuk emansipasi, adalah suatu faktor revolusioner. Tidak membikin perbedaan ini, tidak mengerti perbedaan ini dan menjamakan revolusi di-negeri² imperialis dengan revolusi di-negeri² djadjan, adalah menjimpang dari djalan Marxisme, dari djalan Leninisme, dan menempuh djalan dari mereka yang menjokong Internasionale Kedua”.

Revolusi di Rusia tahun 1905, meskipun menurut waktaknja adalah revolusi burdjuis demokratis, ia ditudjukan terhadap burdjuasi, jaitu terhadap burdjuasi liberal. Sebabnja ialah karena burdjuasi liberal dari suatu negara imperialis tidak boleh tidak tentu kontra-revolusioner. Sebagaimana kita ketahui, Rusia tsar pada waktu itu adalah juga negara yang mendjadjah bangsa² lain. Oleh karena itu, kaum Bolsjewik pada waktu itu tidak dan tidak bisa mempertimbangkan untuk membikin blok dan kerdjasama, meskipun untuk sementara waktu, dengan burdjuasi liberal.

Berbeda dengan revolusi di Tiongkok, yang juga adalah revolusi burdjuis demokratis, sebelum ia mentjapai

kemenangan dan perkembangannya kerevolusi sosialis, disana kaum Komunis bisa dan perlu membikin blok dan mengadakan kerdjasama dengan burdjuasi nasional. Sebabnya ialah karena Tiongkok adalah negeri yang ditindas, negeri setengah djadjahan, dan dalam revolusinya burdjuasi nasional bisa membantu gerakan revolusioner melawan imperialisme.

Inilah tjontoh sedjarah yang menunjukkan perbedaan pemetjahan masalah revolusi dinegeri imperialis dan revolusi dinegeri djadjahan, meskipun watak kedua² revolusi itu sama, yaitu revolusi burdjuis demokratis.

Dengan keterangan diatas ini kiranya tjukup djelas, bahwa pada pokoknya mengerti perbedaan revolusi dinegeri imperialis dan dinegeri djadjahan berarti mengerti bahwa dalam revolusi dinegeri djadjahan gerakan kelas buruh bisa dan perlu membikin blok dan mengadakan kerdjasama dengan burdjuasi nasional, yaitu bisa dan perlu menggalang front persatuan dengan burdjuasi nasional untuk melawan imperialisme asing.

Revolusi dinegeri djadjahan, seperti Revolusi Indonesia, biasa djuga disebut revolusi nasional. Sebabnya ialah karena ia adalah revolusi untuk menjapai kemerdekaan nasional dan untuk mendirikan negara nasional yang merdeka.

Oleh karena itu, berbitjara tentang djalan pemetjahan masalah revolusi dinegeri djadjahan, sama artinja dengan berbitjara tentang djalan pemetjahan masalah gerakan nasional.

Dengan gerakan nasional, atau lengkapnja, gerakan kemerdekaan nasional, dimaksudkan gerakan dari sesuatu nasyon untuk menjapai kemerdekaan nasional dan mendirikan negara nasional yang merdeka. Sebab itu dapatlah dikatakan bahwa revolusi nasional merupakan puntjak dari perkembangan gerakan nasional, ia lahir atau meletus dari gerakan nasional. Dan memang demikianlah yang kita alami dengan revolusi nasional kita, Revolusi Agustus '45.

Berhubung dengan itu, untuk bisa memahami faktor² objektif dari politik atau taktik front persatuan nasional, maka kita perlu mengetahui sedjarah dan faktor² yang melahirkan gerakan nasional pada umumnya. Kita bisa memperoleh pengertian yang tepat mengenai hal ini dengan mempeladjar buku karangan Stalin: „*Marxisme*

dan Masalah Nasional" pada bagian „Gerakan Nasional”.

Untuk kepentingan pendjelasan mengenai faktor² objektif dari politik atau taktik front persatuan nasional, dan sebagai bahan perbandingan untuk memahami bentuk² dan tjiri² dari gerakan nasional kita, maka baiklah kita kutip sebagian besar dari tulisan Stalin itu sbb. :

„Suatu nasyon bukanlah suatu kategori sedjarah semata² melainkan suatu kategori sedjarah jang termasuk dalam suatu zaman tertentu, zaman kebangkitan kapitalisme. Proses lenjapnja feodalisme dan perkembangan kapitalisme adalah bersamaan dengan itu suatu proses persatuan orang² mendjadi nasyon². Demikianlah halnja, misalnja, di Eropa Barat. Orang² Inggeris, Perantjis, Djerman, Italia dan lain²nja membentuk diri mendjadi nasyon² diwaktu kemadjuan jang djaja dari kapitalisme serta kemenangannja atas perpetjahan feodal.

„Tetapi pada waktu itu terbentuknja nasyon² bersamaan dengan itu berarti berubahnja nasyon² itu mendjadi negara² nasional jang merdeka. Nasyon² Inggeris, Perantjis dan nasyon² lainnja adalah bersamaan dengan itu negara² Inggeris, Perantjis, dsb. Irlandia, jang tidak ikutserta dalam proses ini tidaklah merubah gambaran umumnja.

„Di Eropa Timur djalannja agak berlainan. Sementara di Barat nasyon² berkembang mendjadi negara, di Timur terbentuklah negara² multi-nasional, masing² negara terdiri dari beberapa nasionalitet. Demikianlah halnja dengan Austria-Hongaria dan Rusia. Di Austria, ternyata orang² Djerman jang paling maju dalam politik, dan merekalah jang mempersatukan nasionalitet² Austria mendjadi suatu negara. Di Hongaria, jang paling sesuai untuk organisasi negara ialah orang² Magyar — inti dari nasionalitet² Hongaria — dan merekalah jang mempersatukan Hongaria. Di Rusia, peranan sebagai tukang memadukan nasionalitet² dipegang oleh orang² Rusia-Raja, jang dipelopori oleh suatu birokrasi aristokrat militer, jang telah terbentuk menurut sedjarah dan kuat serta terorganisasi baik.

„Demikianlah halnja di Timur.

„Metode pembentukan negara² jang khusus ini dapat berlaku hanjalah ditempat dimana feodalisme belum lenjap, dimana kapitalisme lemah perkembangannja, di-

mana nasionalitet² jang telah didorong kebelakang masih belum dapat mengkonsolidasi diri dilapangan ekonomi mendjadi nasion² jang integral.

„Tetapi kapitalisme mulai berkembang djuga dinegara² Timur. Perniagaan serta alat² perhubungan berkembang. Kota² besar muntjul. Nasion² mendjadi terkonsolidasi dilapangan ekonomi. Kapitalisme, jang melodak didalam kehidupan jang tenang dari nasionalitet² jang terdesak, membangkitkan serta menggerakkan mereka untuk bertindak. Perkembangan pers dan teater, aktivitet Reichsrat (Austria) dan Duma (Rusia) membantu memperkuat 'Sentimen² nasional'. Inteligensia jang sudah bangun diresapi dengan 'ide nasional' dan bertindak kedjurusang jang sama

„Tetapi nasion² jang terdesak, jang tergerak untuk hidup merdeka, tak dapat lagi membentuk diri mendjadi negara² nasional jang merdeka; mereka mendjumpai perlawanan jang kuat dari lapisan² jang berkuasa dari nasion² jang memerintah, jang sudah lama memegang kekuasaan negara. Mereka terlambat.

„Setjara inilah orang² Tjeko, Polandia dsb., membentuk diri mereka mendjadi nasion² di Austria; orang² Kroat, dsb., di Hongaria; orang² Let, Lithuania, Ukraina, Georgia, Armenia, dsb., di Rusia. Apa jang telah mendjadi perketjualian di Eropa Barat (Irlandia) mendjadi kebiasaan di Timur.

„Di Barat, Irlandia mendjawab kedudukannja jang luarbiasa itu dengan gerakan nasional. Di Timur, nasion² jang sudah bangun pasti mendjawab dengan tjara jang sama.

„Dengan begitu timbullah keadaan² jang mendorong nasion² jang masih muda di Eropa Timur kedjalan perdjuangan.

„Perdjuangan itu mulai dan berkobar, sudah tentu, tidak diantara nasion² sebagai keseluruhan tetapi diantara klas² berkuasa dari nasion² jang memerintah dan nasion² jang terdesak. Perdjuangan itu biasanja dilakukan oleh burdjuasi ketjil kota dari nasion jang tertindas terhadap burdjuasi besar dari nasion jang memerintah (bangsa Tjeko dan bangsa Djerman), atau dilakukan oleh burdjuasi desa dari nasion jang tertindas terhadap tuantanah² dari nasion jang memerintah (bangsa Ukraina di Polandia), atau oleh seluruh burdjuasi 'nasional'

dari nasion² jang tertindas terhadap kaum ningrat jang berkuasa dari nasion jang memerintah (Polandia, Lithuania dan Ukraina di Rusia).

„Burdjuasi memainkan peranan memimpin.

„Masalah utama bagi burdjuasi muda ialah masalah pasar. Tudjuannja ialah mendjual barang²nja dan keluar sebagai pemenang dari persaingan dengan burdjuasi dari nasionalitet lain. Karena itu keinginannja ialah mendapatkan pasarnja 'sendiri', pasar 'dalamnegeri'-nja. Pasar adalah sekolah pertama dimana burdjuasi beladjar kenal dengan nasionalismenja.

„Tetapi soalnja biasanja tidak terbatas pada pasar saja. Birokrasi setengah-burdjuis, setengah-feodal, dari nasion jang memerintah tjampur-tangan dalam perdjjuangan dengan metode²nja sendiri jaitu metode² 'menahan dan mentjegah'. Burdjuasi dari nasion jang memerintah, baik besar atau ketjil, dapat menghadapi saingan²nja lebih 'tjepat' dan 'menentukan'. 'Kekuatan²' dipersatukan dan serentetan peraturan² pembatasan dijalankan terhadap burdjuasi 'asing', peraturan² jang berubah mendjadi tindakan² penindasan. Perdjjuangan beralih dari lapangan ekonomi kelapangan politik. Pembatasan atas kemerdekaan bergerak, penindasan atas bahasa, pembatasan hakpilih, pembatasan beragama dan seterusnya ditumpuk diatas kepala 'saingan'. Sudah barang tentu peraturan² sedemikian itu dimaksudkan tidak hanja untuk kepentingan klas² burdjuis dari nasion jang memerintah, tetapi djuga untuk mengedjar tudjuan² kasta jang istimewa, boleh dibilang, dari birokrasi jang memerintah. Tetapi dilihat dari sudut hasil² jang ditjapai hal ini sama sekali tidak penting: klas² burdjuis dan birokrasi dalam hal ini bergandengan tangan — apakah ia itu di Austria — Hongaria atau di Rusia.

„Burdjuasi dari nasion jang terdindas, jang digentjet dalam segala lapangan, sewadjarnjalah bangkit bergerak. Ia berseru kepada 'Rakjat bumiputera'-nja dan mulai menggembar-gemborkan tentang 'tanahair', menjatakan bahwa tudjuannja sendiri adalah tudjuan nasion sebagai keseluruhan. Ia mengumpulkan suatu tentara dari kalangan 'orang² setanahairnja' untuk kepentingan 'tanahair'. Djuga 'Rakjat' tidak selalu tinggal diam terhadap seruan²nja, mereka berhimpun disekitar pandji²-

nja: penindasan dari atas mengenai diri mereka djuga dan menimbulkan ketidak-puasan mereka.

„Dengan begitu mulailah gerakan nasional.

„Kekuatan gerakan nasional ditentukan oleh tingkatan sampai kemana lapisan² jang luas dari nasion, proletariat dan kaum tani, turut serta didalamnya.

„Apakah proletariat berhimpun kesekitar pandji² nasionalisme burdjuis adalah bergantung pada tingkatan perkembangan kontradiksi² klas, pada kesedaran klas serta tingkatan organisasi proletariat. Proletariat jang berkesadaran-klas mempunyai pandji²nja sendiri jang sudah terudji, dan ia tak perlu berbaris dibawah pandji² burdjuasi.

„Mengenai kaum tani, ikutsertanja mereka dalam gerakan nasional bergantung per-tama² pada watak dari-pada penindasan. Djika penindasan itu mengenai 'tanah', seperti halnya di Irlandia, maka massa petani terus berhimpun kesekitar pandji² gerakan nasional.

„Sebaliknya, djika misalnja, di Georgia tidak ada nasionalisme *anti-Rusia* jang serius, maka sebabnja jang per-tama² jalah karena disana tidak ada tuantanah² Rusia atau burdjuasi besar Rusia jang menjediakan bahan-bakar bagi nasionalisme sedemikian itu dikalangan massa. Di Georgia terdapat nasionalisme *anti-Armenia*; tetapi ini adalah karena disana ada burdjuasi besar Armenia jang, karena memukul burdjuasi ketjil Georgia jang masih belum terkonsolidasi, mendorong burdjuasi ketjil Georgia itu kenasionalisme *anti-Armenia*.

„Bergantung pada faktor² ini, gerakan nasional itu akan mempunyai watak massal dan terus tumbuh (seperti di Irlandia dan Galicia), atau berubah mendjadi serentetan bentrokan² ketjil² jang kian lama kian merosot mendjadi pertjektjokan² dan 'perkelahian²' mengenai papannama² (seperti dibeberapa kota di Bohemia).

„Sudah barang tentu sifat dari gerakan nasional itu tidak akan sama di-mana²: seluruhnja ditentukan oleh berbagai tuntutan jang diadjukan oleh gerakan. Di Irlandia gerakan itu mempunyai watak agraria, di Bohemia bertalian dengan 'bahasa'; disatu tempat tuntutanja jalah persamaan deradjat warganegara dan kemerdekaan beragama; ditempat lain tuntutanja jalah pegawai² dari nasion itu 'sendiri' atau Madjelis sendiri. Berbagai ma-

tjam tuntutan itu tidak djarang menjingkapkan ber-ma-
tjam² tjiri jang menandai suatu nasion pada umumnja
(bahasa, wilajah, dll.). Perlu diperhatikan bahwa kita
tidak pernah mendjumpai suatu tuntutan jang bertalian
dengan 'watak nasional' jang mentjangkum se-gala²nja
dari Bauer. Dan ini adalah wadjar: 'watak nasional' itu
dengan sendirinja adalah sesuatu jang sukar ditangkap
dan, seperti dengan tepat dinjatakan oleh J. Strasser, 'apa
jang dapat diperbuat dengan itu dalam politik?'

„Demikianlah, pada umumnja, bentuk² serta tjiri² ge-
rakan nasional.

„Dari apa jang telah dikatakan tadi mendjadi djelas-
lah bahwa perdjjuangan nasional didalam keadaan kapi-
talisme jang sedang bangkit adalah satu perdjjuangan dari
klas² burdjuis diantara mereka sendiri. Kadang² bur-
djuasi berhasil menarik proletariat kedalam gerakan na-
sional, maka perdjjuangan nasional itu pada lahirnja se-
akan² mempunjai watak 'senasion'. Tetapi begitu itu
hanja pada lahirnja sadja. Pada hakekatnja ia selamanya
adalah suatu perdjjuangan burdjuis, suatu perdjjuangan
jang terutama menguntungkan dan tjotjok bagi burdjuasi.

„Tetapi dari sini tidaklah berarti bahwa proletariat
lalu tidak boleh melakukan perdjjuangan melawan politik
penindasan nasional.

„Pembatasan kemerdekaan bergerak, pentjabutan hak-
pilih, penindasan atas bahasa, pembatasan sekolah² dan
bentuk² penindasan lainnja tidak kurang mengenai kaum
buruh, kalau tidak lebih, daripada burdjuasi. Keadaan
jang sedemikian itu hanjalah membantu menghambat
perkembangan setjara bebas dari kekuatan² intelek pro-
letariat dari nasion² bawahan (djadjahan). Tak akan
bisa ada kemungkinan bagi perkembangan sepenuhnya
dari bakat² intelek buruh Tatar atau Jahudi djika dia
tidak diperbolehkan mempergunakan bahasa aslinja da-
lam rapat² dan tjeramah², dan djika sekolah²nja ditutup.

„Tetapi politik penindasan nasional itu berbahaya bagi
perdjjuangan proletariat djuga dalam arti jang lain. Ia
mengalihkan perhatian lapisan² penduduk jang luas dari
soal² kemasjarakatan, soal² perdjjuangan klas, ke-soal²
nasional, soal² jang 'umum' bagi proletariat dan bur-
djuasi. Dan ini mentjiptakan tanah jang baik untuk pro-
paganda palsu tentang 'keharmonian kepeutingan²', un-

tuk menjelubungi kepentingan² klas daripada proletariat dan untuk perbudakan intelek daripada kaum buruh. Ini menimbulkan rintangan jang serius bagi pekerdjaan mempersatukan kaum buruh dari semua nasionalitet. Djika sebagian besar dari kaum buruh Polandia masih dalam perbudakan intelek pada kaum nasionalis burdjuis, djika mereka masih menjisihkan diri dari gerakan buruh internasional, maka sebabnja jang utama jalah karena politik anti-Polandia jang ber-abad² lamanja dari 'pemerintah jang berkuasa' mentjiptakan tanah bagi perbudakan ini, dan menghalangi pembebasan kaum buruh daripadanya.

„Tetapi politik penindasan itu tidak berhenti disini saja. Tidak djarang ia beralih dari 'sistem' menghasut nasion² satu sama lain, kesuatu 'sistem' penjembelihan² besar²an dan pogrom. Sudah barang tentu jang tersebut belakangan ini tidak selalu dan dimana saja mungkin, tetapi dimana mungkin — dengan tidak adanja hak² sivil jang elementer — ia seringkali mengambil bentuk jang mengerikan dan mengantjam akan menenggelamkan tudjuan persatuan kaum buruh dalam darah dan airmata. Kaukasia dan Rusia Selatan memberikan banjak tjontoh. 'Memetjah-belah dan menguasai' — itulah maksud politik menghasut nasion² satu sama lain. Dan dimana politik sedemikian itu berhasil sangatlah buruk bagi proletariat dan merupakan rintangan jang serius bagi pekerdjaan mempersatukan kaum buruh dari semua nasionalitet dalam negara”.

Dari tulisan Stalin diatas ini, ketjuali kita mendapatkan pengertian² jang djelas dalam berbagai segi mengenai gerakan nasional, kita djuga bisa menarik berbagai pelajaran dan kesimpulan dalam hubungan dengan masalah front persatuan nasional.

Misalnja, dalam tulisan diatas ini Stalin dengan sangat djelas dan mudah difahamkan menerangkan bagaimana hubungannja gerakan nasional dengan proses pembentukan sesuatu nasion dan negara nasional jang merdeka, bahwa gerakan nasional timbul karena penindasan terhadap perkembangan jang wadjar dari sesuatu nasion mendjadi negara nasional jang merdeka.

Kepada kita ditundjukkan bahwa pada zaman bangkitnja kapitalisme dan runtuhnja feodalisme, jaitu zaman lahirnja nasion² dan negara² nasional (artinja : pada

zaman feodalisme belum ada nasion² dan negara² nasional), pada zaman itu gerakan nasional dalam hakekatnya ialah selalu perjuangan burdjuis, perjuangan yang terutama menguntungkan dan tjotjok bagi burdjuasi. Rol pimpinan dalam gerakan nasional pada waktu itu djuga dipegang oleh klas burdjuis. Tetapi dari sini, sekali² tidak boleh diartikan bahwa klas buruh tidak boleh ber-sama² dengan klas burdjuis melakukan perlawanan terhadap politik penindasan nasional. Sebab politik penindasan nasional tidak kurang, malahan bisa lebih mengenai klas buruh daripada mengenai klas burdjuis sendiri.

Djuga didjelaskan kepada kita bahwa yang menentukan kekuatan gerakan nasional ialah tingkatan sampai dimana klas buruh dan kaum tani turut didalamnya, bahwa berhimpun atau tidaknya klas buruh kesekitar pandji² nasionalisme burdjuis adalah bergantung pada tingkatan perkembangan kontradiksi² klas, pada kesedaran klas serta tingkatan organisasi proletariat, dan bahwa turutnja kaum tani dalam gerakan nasional bergantung per-tama² pada penindasan kekuasaan asing mengenai „tanah”. Dengan pendjelasan ini mengertilah kita bahwa memang ada faktor yang sangat membantu untuk kuatnja gerakan nasional dinegeri kita. Hal ini djika kita ingat bahwa penindasan kolonial Belanda di Indonesia djuga banyak mengenai „tanah”. Malahan penindasan yang mula² dilakukan oleh kaum kolonialis Belanda terhadap Rakjat Indonesia ialah mengenai kaum tani, seperti yang dilakukan melalui V.O.C. Ketjuali itu, mayoritas yang sangat besar dari kaum buruh Indonesia bekerja pada perusahaan² imperialis, berhubung klas burdjuis Indonesia pada umumnya adalah kapitalis dagang dan lemah. Hal ini berarti tidak memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya kontradiksi yang tajam antara klas buruh Indonesia pada umumnya dengan klas burdjuisnja, dan sampai batas² tertentu hal ini membantu dalam penggalangan front persatuan nasional.

Selandjutnja, dalam tulisan Stalin itu dengan djelas djuga ditundjukkan kerugian² dan bahaya² yang bisa ditimbulkan oleh politik penindasan nasional bagi perjuangan klas buruh, seperti misalnja: terhambatnja perkembangan yang bebas dari kekuatan² intelek klas buruh,

mengaburkan perjuangan klas, menimbulkan perbudakan intelek dari kaum buruh kepada kaum nasionalis burdjuis, merintangi persatuan dan solidaritet klas buruh setjara internasional, dsb.

Apakah dalam zaman imperialisme, jaitu zaman bangkitnja kapitalisme, gerakan nasional menjadi tidak lagi mengandung watak burdjuis?

Tentang hal ini Lenin dalam „Laporan Komisi Mengenai Masalah Nasional Dan Kolonial Kepada Kongres Kedua Komintern” (26 Djuli 1920) ada mengatakan: „Tidak perlu diragukan sedikitpun djuga bahwa setiap gerakan nasional tidak bisa lain adalah gerakan burdjuis-demokratis, karena bagian jang sangat besar dari massa penduduk di-negeri² terbelakang terdiri dari kaum tani jang mewakili hubungan² burdjuis-kapitalis”.

Dengan demikian djelaslah, bahwa nasionalisme seperti jang terdapat pada zaman bangkitnja kapitalisme masih ada djuga pada zaman imperialisme dan zaman peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme sekarang ini. Ia terdapat di-negeri² kolonial dan negeri² tergantung seperti di-negeri² Asia-Afrika pada umumnja dan Amerika Latin. Sebabnja jalah karena klas burdjuis nasional di-negeri² ini mempunyai kepentingan² jang bertentangan, pertama², dengan kepentingan² imperialisme, kedua, dengan kepentingan² kekuatan² feodal jang terbelakang di-negeri² nj.

Dalam karangannja „Internasionalisme dan Nasionalisme”, Liu Sau-tji ada mengatakan: „Nasionalisme burdjuis di-negeri² ini (maksudnja di-negeri² kolonial dan semi-kolonial — Mhl.) mempunyai arti progresif jang menentukan djika burdjuasi memobilisasi massa dalam perjuangan melawan imperialisme dan kekuatan² feodal. Seperti dinjatakan oleh Lenin (didalam pidato jang diutjapkan pada Kongres Kedua Bangsa² Timur), nasionalisme matjam ini 'mempunyai pembenaran sedjarah'. Oleh karena itu, dengan tudjuan menggulingkan kekuasaan imperialisme dan kekuatan² feodal, proletariat harus bekerdjasama dengan nasionalisme burdjuis jang memainkan rol anti-imperialis dan anti-feodal jang pasti, asal sadja, seperti dikatakan oleh Lenin, bahwa persekutuan² ini tidak merintangi kita dalam mendidik dan mengorganisasi kaum tani dan massa luas dari Rakjat jang terhisap didalam semangat revolusioner.

„Tjontoh jang paling terang dari kerdjasama sematjam ini ialah apa jang terdjadi antara kita kaum Komunis Tiongkok dan Sun Jat-sen”.

Pada zaman bangkitnja kapitalisme, karena proletariat masih muda, maka tidak bisa lain bahwa proletariat belum bisa mendjalankan rol memimpin didalam perdjuaan nasional melawan burdjuasi asing. Rol memimpin pada waktu itu dimainkan oleh burdjuasi nasional dan kemenangan komplit daripada perdjuaan nasional waktu itu ialah berdirinja negara nasional jang merdeka jang mendjamin perkembangan kapitalisme lebih landjut.

Sebaliknya, dalam zaman imperialisme, zaman bangkrutnja kapitalisme sekarang ini, perdjuaan nasional melawan imperialisme, artinja djuga melawan burdjuasi asing, tidak mungkin mentjapai kemenangan komplit, kemenangan jang sempurna, djika hegemoni tidak ditangan proletariat.

Tetapi bagaimanapun djuga, dalam gerakan nasional pada ke-dua² zaman itu, terdapat kebutuhan objektif jang sama, jaitu kebutuhan akan kerdjasama dan perskutuan antara burdjuasi nasional dan proletariat untuk melawan penindasan nasional.

Tetapi klas burdjuis nasional, meskipun nasional, adallah klas penghisap. Oleh karena itu, antara klas burdjuis nasional dan klas buruh serta Rakjat pkerdja lainnja, jang majoritetnja terdiri dari kaum tani, tetap terdapat pertentangan kepentingan, jaitu tetap terdapat perdjuaan klas. Tetapi karena adanja apa jang dikatakan oleh Stalin „elemen nasional, sebagai suatu elemen dalam perdjuaan untuk emansipasi”, jaitu adanja penindasan terhadap elemen jang mendjadi bagian dari tjiri² nasyon, maka didalam revolusi majoritet daripada nasyon, dari burdjuasi nasional sampai kepada kaum buruh dan kaum taninja bisa bekerdjasama dan bersekutu didalam front persatuan nasional anti-imperialisme. Pendeknja dalam front persatuan nasional itu bekerdjasama dan bersekutulah semua kekuatan jang anti-imperialis.

Mengingat kenjataan bahwa kekuatan pokok dari revolusi nasional adalah klas buruh dan kaum tani, sebagai dua kekuatan jang paling konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme serta tidak mempunyai pertentangan kepentingan satu sama lain, maka pada pokoknja masa-

lah front persatuan nasional adalah masalah front persatuan antara kelas buruh dan kaum tani disatu pihak dengan kelas burjuis nasional difihak lain.

Mengukur kekuatan kelas burjuis nasional tidaklah terutama dari jumlah orang yang termasuk dalam kelas itu atau dari kekuatan organisasi partainya, melainkan dari kekuatan pengaruh politik dan ideologinya dikalangan massa Rakyat. Djika dilihat dari jumlah orang dan kekuatan organisasi partainya saja barangkali bisa dikatakan bahwa burjuasi nasional tidaklah besar kekuatannya. Tetapi djika dilihat dari pengaruh politik dan ideologinya maka tidak ragu lagi harus dikatakan bahwa kekuatan burjuasi nasional itu adalah besar.

Dasar pertimbangan yang objektif dari politik front persatuan dengan burjuasi nasional ialah bahwa: *dalam revolusi nasional kelas burjuis nasional bukan saja tidak menjadi sasaran revolusi, tetapi malahan sampai batas tertentu bisa turut mengambil bagian didalam revolusi*

Gerakan nasional atau revolusi nasional adalah pertama² perjuangan yang ditudjukan untuk menggulingkan kekuasaan burjuasi asing atau imperialisme. Sebab itu burjuasi asing atau imperialisme menjadi sasaran atau musuh yang utama dan pertama dari gerakan nasional atau revolusi nasional.

Oleh karena itu, berjuang melawan imperialisme bersama kompradornya, yang masih merupakan kekuatan yang besar, dengan tidak menggalang front persatuan dengan burjuasi nasional adalah sama artinya dengan menjalankan politik menumbukkan kepala kepada tembok batu.

II. PERSEKUTUAN BURUH DAN TANI

Didalam Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI ada diterangkan: „Karena Indonesia adalah negeri yang masih belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, maka revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme, burjuasi komprador dan kaum kapitalis birokrat. Tenaga² penggerak revolusi Indonesia adalah kaum buruh, kaum tani, kelas burjuis ketjil dan elemen² demokratis lainnya, sedangkan tenaga pokoknya adalah kaum tani. Karena sa-

saran² dan tenaga² penggerak revolusi ini, karena di Indonesia sudah ada Partai Komunis jang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, dan karena keadaan² internasional sekarang, semuanya ini menentukan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis tipe baru atau revolusi burdjuis-demokratis dalam zaman imperialisme dan revolusi proletar dunia. Revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat jang luas, jang untuk bagian terbesar terdiri dari kaum tani, dibawah pimpinan proletariat."

Dari perumusan diatas teranglah bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang, meskipun pada dasarnya berwatak burdjuis-demokratis, tetapi tudjuannya bukan lagi terbentuknja masjarakat kapitalis dan negara dibawah diktatur burdjuis, melainkan masjarakat demokrasi baru dan negara dibawah kekuasaan bersama dari semua klas jang revolusioner. Oleh karena itu sudah dengan sendirinja bahwa tugas dan tanggungjawab untuk memimpin revolusi Indonesia supaja bisa mentjapai tudjuannya jang objektif, tidak bisa lain ketjuali djatuh diatas pundak klas buruh. Tegasnja revolusi Indonesia hanja bisa mentjapai kemenangan sempurna berupa kemerdekaan nasional jang penuh djika hegemoni ada ditangan proletariat.

Apakah sjarat²nja supaja klas buruh bisa memenuhi tugasnja memimpin revolusi sampai menang?

Pertama, seperti diterangkan dalam Program PKI: „Klas buruh harus memelopori perdjuaan seluruh Rakjat. Untuk tudjuan ini klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitetnja, mendidik dirinja sendiri dan mendjadi kekuatan jang besar dan sedar. Klas buruh tidak hanja harus melakukan perdjuaan untuk memperbaiki tingkat hidupnja, ia djuga harus meningkatkan tugas²nja ketinggian jang lebih luas dan lebih tinggi. Ia harus membantu perdjuaan klas² lainnja. Klas buruh harus membantu perdjuaan kaum tani untuk tanah, perdjuaan inteligensia untuk hak²nja jang pokok, perdjuaan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perdjuaan seluruh Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan² demokratis. Rakjat bisa mentjapai kemenangan hanja apabila klas buruh Indonesia sudah merupakan kekuatan jang bebas, sedar, matang

dalam politik, terorganisasi dan mampu memimpin per-djuangan seluruh Rakjat, hanja apabila Rakjat sudah melihat klas buruh sebagai pemimpinnja”.

Tetapi klas buruh Indonesia mempunjai kelemahan² jang tidak bisa dihindari, jaitu : 1) djumlahnja ketjil djika dibandingkan dengan djumlah kaum tani dan lapisan burdjuasi ketjil kota, 2) usianja masih muda djika dibandingkan dengan klas buruh negeri² kapitalis jang sudah madju di Eropa, dan 3) tingkat kebudajaannja masih rendah djika dibandingkan dengan tingkat kebudayaan burdjuasi.

Dengan kelemahan² ini mengertilah kita betapa mendjadi lebih berat dan sukarnja tugas klas buruh Indonesia untuk memimpin revolusi. Sebab, dengan djumlah jang ketjil, klas buruh Indonesia harus tjukup mempunjai daja tarik dan daja mempersatukan majoritet dari massa Rakjat jang djumlahnja berlipat kali djauh lebih besar. Dengan usia jang muda, dan usia muda berarti kurang pengalaman, klas buruh Indonesia harus bisa memberikan pimpinan kepada perdjjuangan seluruh Rakjat melawan burdjuasi asing jang sudah banjak pengalaman dalam menindas gerakan klas buruh dan gerakan Rakjat umumnja. Dan dengan tingkat kebudayaan jang masih rendah, klas buruh Indonesia harus menempati kedudukan jang memberikan pimpinan kepada seluruh gerakan Rakjat, termasuk gerakan klas burdjuis nasional jang dengan sendirinja tingkat kebudajaannja lebih tinggi daripada klas buruh sendiri.

Semua kelemahan ini adalah kelemahan² jang tidak bisa dihindari, karena ia adalah sebagai akibat jang djuga tidak bisa dihindari, jaitu akibat penindasan kolonialisme. Tetapi kelemahan² jang tidak bisa dihindari ini samasekali tidak berarti bahwa semua itu tidak bisa diatasi.

Berhubung dengan kelemahan pertama, kelemahan dalam hal djumlah ketjil, Dimitrov pernah berkata : „Tetapi, satu soal jang tidak boleh dilupakan : disemua negeri dimana proletariat menurut perbandingan ketjil djumlahnja, dimana kaum tani dan lapisan burdjuis ketjil kota djumlahnja djauh lebih besar, maka mendjadi lebih² penting lagi untuk melakukan segala usaha guna membentuk front persatuan klas buruh sendiri jang teguh,

supaja ia bisa menempati kedudukannya sebagai faktor pimpinan didalam hubungan dengan semua Rakjat pekerdja”.

Perkataan Dimitrov ini sepenuhnya berlaku untuk Indonesia. Sebab itu djalan yang harus kita tempuh untuk mengatasi kelemahan klas buruh Indonesia dalam hal djumlahnya yang ketjil itu, ialah dengan sungguh² mendjalankan apa yang dikatakan oleh Dimitrov, jaitu „melakukan segala usaha guna membentuk front persatuan klas buruh sendiri yang teguh”.

Mengenai kelemahan kedua, kelemahan dalam hal usia muda, yang berarti kurang pengalaman, hal ini bisa diatasi dengan ke-sungguh²an dan keradjinan kita didalam mempeladjadi pengalaman² gerakan klas buruh dari negeri² kapitalis yang sudah madju, dan chususnja dari pengalaman² gerakan klas buruh yang sudah menang. Pengalaman² mereka yang sangat kaya itu sudah banjak ditulis mendjadi teori perdjuaan klas buruh berupa literatur Marxis-Leninis, yang sekarang ini disamping sudah banjak terdapat dinegeri kita dan malahan sudah agak banjak yang diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia, djuga sudah mulai diubah dan dipadukan dengan pengalaman revolusi Indonesia dalam bentuk tulisan² dari kaum Komunis Indonesia sendiri.

Se-sukar²nja perdjuaan klas buruh Indonesia sekarang ini tidaklah begitu sukar seperti perdjuaan klas buruh Rusia yang per-tama² mendapat kemenangan. Kesukaran² didalam perdjuaan kita sekarang ini bisa mendjadi tidak begitu sukar lagi, dan kesalahan² bisa dikurangi atau dihindari, asal sadja kita mau dengan sungguh², setjara teliti dan kritis mempeladjadi pengalaman² gerakan klas buruh yang sudah menang dan gerakan klas buruh dari negeri² yang sudah lebih madju.

Pendeknja, ketinggalan dalam pengalaman karena usia yang masih muda bisa kita kedjar dengan beladjar dari pengalaman² gerakan klas buruh yang sudah menang dan yang sudah lebih madju.

Djuga mengenai kelemahan yang ketiga, kelemahan dalam hal rendahnja tingkat kebudajaan, ada djalan untuk mengatasinja. Djalan itu ialah dengan sungguh² mendjadikan aktivitet beladjar — dari pemberantasan butahuruf sampai kepada beladjar pengetahuan umum — sebagai salahsatu aktivitet yang terpenting, disamping

perjuangan politik dan perjuangan perbaikan nasib se-hari², didalam gerakan klas buruh dan gerakan Rakjat progresif pada umumnja.

Untuk menggalang front persatuan klas buruh, dinegeri kita terdapat faktor² objektif jang sangat menguntungkan. Faktor² objektif jang menguntungkan itu antara lain, ialah bahwa organisasi² buruh di Indonesia telah sama lahir kembali dalam masa Revolusi Agustus '45, jang telah memberikan tradisi persatuan dan tradisi revolusioner jang sangat dalam dikalangan kaum buruh. Dju-ga reformisme jang merupakan tanah subur bagi serikat-buruh² dengan pimpinan jang reaksioner tidak mempunjai dasar jang kuat dinegeri kita. Hal ini disebabkan karena kaum buruh dan Rakjat pekerdja umumnja mengalami penghisapan dan penindasan jang luarbiasa, sedangkan kaum imperialis dan burdjuasi kompradornja, jang sudah semakin bangkrut karena tidak gampang lagi dan semakin sempit sumber²nja untuk memperoleh keuntungan luarbiasa, mendjadi lebih terbatas sjarat²nja untuk melakukan suapan guna mentjiptakan lapisan atas jang agak luas dari klas buruh jang bisa dipergunakan untuk menekan dan memetjah-belah gerakan klas buruh.

Tetapi disamping itu perlu diperingatkan, bahwa djika kemelantaran jang luarbiasa dan merata dinegeri kita tidak memberikan tanah jang subur untuk reformisme, maka sebaliknya ia mendjadi tanah jang subur untuk penyakit radikalisme ke-kiri²an dan anarkisme. Untuk melawan penyakit ini kita harus dengan sabar dan ulet mendidik dan melatih massa kaum buruh dan massa pekerdja umumnja dalam praktek aksi² setjara terorganisasi dan dengan berpegangan kepada sembojan „aksi ketjil-hasil”.

Berhasilnja penggalangan front persatuan klas buruh ini bergantung pada kader² Komunis jang dengan sedat bisa mempergunakan faktor² objektif jang sangat menguntungkan dan jang dengan sedar melakukan segala usaha untuk mengatasi kelemahan² klas buruh Indonesia jang tidak bisa dihindari itu. Untuk ini kader² Komunis jang bekerdja dikalangan kaum buruh harus lebih tjepat dan lebih keras lagi didalam usahanja untuk meninggikan tingkatan politik dan ketjakapannja sebagai trade unionist (orang serikatburuh), supaja bisa lebih banjak membangkitkan kesatuan² aksi dari massa kaum buruh, sebagai sendjata jang paling tadjam untuk melawan dan

menelandjangi aktivitas petjah-belah dari pemimpin² reaksioner dalam gerakan buruh.

Kedua, klas buruh harus bisa menetapkan dan menarik sekutunja yang terbesar dan tepertjaja. Soal sekutu adalah soal yang sangat penting bagi siapa yang hendak menudju dan bersiap untuk memegang kekuasaan negara.

Didalam Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI seperti yang dikutip diatas terdapat kalimat : „Revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat yang luas” Siapakah yang dimaksudkan dengan „massa Rakjat yang luas” didalam kalimat ini?

Karena Rakjat Indonesia sebagian besar adalah kaum tani, maka yang dimaksudkan dengan „massa Rakjat yang luas” itu tidak bisa lain jalah terutama kaum tani. Itulah sebabnja orang djuga suka mengatakan bahwa revolusi agraria, jaitu revolusinja kaum tani. Sebab itu teranglah, bahwa sekutu yang sebenarnja, yang tepertjaja dan yang terbesar dari klas buruh didalam revolusi jalah kaum tani.

Begitu pentingnja kedudukan kaum tani sebagai sekutu bagi proletariat untuk bisa mentjapai dan seterusnya mempertahankan kekuasaan, sehingga dikatakan oleh Stalin : „masalah tani adalah bagian dari masalah umum dari diktatur proletariat, dan dengan demikian mendjadi salahsatu masalah yang vital dari Leninisme”.

Bagaimanakah klas buruh bisa menarik kaum tani mendjadi sekutunja ?

Dengan kaum tani disini terutama dimaksudkan tanimiskin dan tanisedang. Buruhtani sudah terang merupakan proletariat desa, sedangkan kaum tanimiskin, yang merupakan massa tani yang sangat luas, yang tidak mempunyai tanah atau sedikit mempunyai tanah, mereka adalah semi-proletariat desa. Kaum tanisedang pada umumnja tidak melakukan penghisapan, tetapi malahan mengalami penghisapan oleh imperialisme, tuantanah dan burdjuasi. Oleh karena itu, kaum tanisedang bukan sadja bisa turut dalam revolusi anti-imperialis dan revolusi agraria, melainkan djuga bisa menerima Sosialisme. Kaum tanikaja, meskipun mereka tidak bisa kita masukkan sebagai klas tuantanah, karena mereka sendiri pada umumnja masih djuga melakukan pekerdjaan, tetapi mereka disamping menjewakan sebagian dari tanahnja djuga melakukan pekerdjaan sebagai lintahdarat dan menghisap

kaum buruhtani. Oleh karena itu, kaum tanikaja ini paling² bisa netral dalam revolusi agraria dan bisa membantu sekedarnja dalam perdjjuangan anti-imperialis.

Djadi djelasnja, jang bisa dan harus ditarik dari kaum tani sebagai sekutu klas buruh ialah pada pokoknja kaum tanimiskin dan kaum tanisedang. Untuk menarik mereka sebagai sekutu, maka mereka harus mendapat bantuan dan pimpinan didalam perdjjuangan mereka untuk melawan penindasan dan ikatan² dari kaum tuan-tanah dan kaum lintahdarat, dan untuk mendapatkan tanah garapan. Mereka harus mendapat bantuan dan pimpinan setjukupnja supaja bisa mengorganisasi diri didalam perdjjuangan mereka se-hari². Hal ini hanya bisa ditjapai djika terdapat tjukup banjak kader Komunis jang mengerti betul² tentang hubungan agraria, tentang tuntutan² serta kehidupan kaum tani dan setjara militan, ichlas serta giat bekerdja dikalangan mereka.

Djelaslah kiranja, bahwa hakekat dari persekutuan buruh dan tani itu terletak dalam politik jang didjalankan oleh Partai Komunis mengenai kaum tani. Oleh karena itu, persekutuan buruh dan tani hanya bisa diwujudkan didalam praktek sebagai hasil dari garis politik Partai Komunis mengenai kaum tani, jaitu sebagai hasil dari aktivitas kaum Komunis didesa jang setjara politik dan organisasi memberikan pimpinan kepada kaum tani.

Ada satu faktor jang menguntungkan untuk tertjiptanja persekutuan buruh dan tani dinegeri kita, ialah karena usianja jang masih muda maka klas buruh Indonesia sebagian besarnja masih dekat sebagai keturunan, dan malahan masih langsung sebagai keluarga kaum tani jang bangkrut. Hal ini disatu fihak mempunyai segi jang merugikan, jaitu masih kuatnja melekat ideologi burdjuis ketjil dari kaum tani dikalangan klas buruh Indonesia, tetapi difihak lain mempunyai segi jang menguntungkan, jaitu terdapatnja pertalian² jang wadjar berupa hubungan keluarga antara kaum buruh dan kaum tani jang luas. Dengan pertalian² jang wadjar antara kaum buruh dan kaum tani ini, maka aksi² dan pengalaman² revolusioner dari kaum buruh dikota bisa lebih mudah disampaikan dan disebarkan dikalangan kaum tani didesa.

Djika dua matjam pekerdjaan diatas ini bisa dilaksanakan dengan se-baik²nja, jaitu membentuk front persatuan klas buruh jang teguh dan memberikan pimpinan

politik dan organisasi yang setjukepnya dan tepat kepada kaum tani, maka barulah bisa ditijptakan persekutuan buruh dan tani yang kuat dibawah pimpinan klas buruh. Dengan demikian tertijptalah basis front persatuan nasional yang luas dan kuat. Tanpa persekutuan buruh dan tani kita tidak bisa bitjara tentang front persatuan nasional yang sesungguhnya, dan kita tidak bisa bitjara tentang kemenangan revolusi.

III. KEBEBASAN PARTAI KOMUNIS DALAM FRONT PERSATUAN

Seperti sudah diterangkan diatas, masalah front persatuan nasional pada pokoknya adalah masalah front persatuan antara klas buruh dan kaum tani disatu fihak dan klas burdjuis nasional difihak lain. Klas burdjuis nasional adalah klas yang melakukan penghisapan sedangkan klas buruh dan kaum tani (maksudnya kaum tanimiskin dan tanisedang) bukan sadja pada pokoknya tidak melakukan penghisapan tetapi malahan dihisap. Djadi, antara klas burdjuis nasional dan klas buruh serta kaum tani terdapat perbedaan watak dan kepentingan klas.

Bersumber kepada perbedaan watak dan kepentingan klas ini, maka klas buruh dan kaum tani disatu fihak dan klas burdjuis nasional difihak lain, masing² mempunyai konsep politik sendiri dalam hubungan dengan penjelesaian revolusi.

Sebagaimana diketahui, dalam hubungan dengan soal penjelesaian tuntutan² Revolusi Agustus 1945, kaum buruh, kaum tani, dan burdjuasi ketjil kota, sebagai kekuatan² progresif dibawah pimpinan Partai Komunis, mempunyai konsep untuk menghapuskan hak² kaum imperialis dilapangan politik, ekonomi dan kebudayaan, dan untuk menghapuskan milik feodal atas tanah serta mengadakan perubahan tanah guna melaksanakan sembojan „tanah untuk petani”. Sedangkan konsep kekuatan tengah, jaitu kekuatan burdjuasi nasional, jalah supaja di Indonesia diadakan perubahan² dengan maksud mem-bela kepentingan sendiri untuk perkembangan kapitalisme.

Karena perbedaan konsep ini maka dengan sendirinya diantara klas buruh dan klas burdjuis nasional terdjadi

persaingan untuk bisa memegang hegemoni didalam revolusi.

Apakah bisa digalang front persatuan diantara dua kekuatan, jaitu kekuatan klas buruh dengan sekutunja — kaum tani — dan klas burdjuis nasional, jang mempunyai perbedaan kepentingan dan perbedaan konsep politik dengan tidak salahsatuja meleburkan diri atau melepaskan kebebasannja?

Memang pertentangan kepentingan antara klas buruh dan klas burdjuis nasional, dan perbedaan konsep masing² jang menimbulkan persaingan untuk bisa memegang hegemoni didalam revolusi tidak bisa dihindari apa lagi dilenjakkan. Tetapi untuk kepentingan perjuangan melawan musuh bersama, jaitu melawan imperialisme asing, pertentangan antara klas buruh dan klas burdjuis nasional itu bisa diselaraskan. Inilah jang bisa kita namakan menjelajarkan perjuangan klas dengan perjuangan nasional dalam arti jang benar² revolusioner.

Apakah jang bisa dijadikan ukuran untuk menetapkan bahwa Partai Komunis sungguh² memegang kebebasannja didalam mendjalankan politik front persatuan dengan klas burdjuis nasional?

Karena Partai Komunis mempunyai programnja sendiri dan program itu hanya bisa ditjapai dengan perjuangan revolusioner dari massa, maka ukuran jang harus kita pakai untuk menetapkan kebebasan Partai Komunis dalam front persatuan dengan klas burdjuis nasional ialah, per-tama² apakah Partai Komunis itu mendjalankan programnja berdasarkan perjuangan jang revolusioner dari massa ataukah tidak. Kita bisa lebih memahami lagi sjarat² atau ukuran² dari kebebasan Partai Komunis didalam front persatuan ini djika kita teliti apa jang pernah dikatakan oleh Stalin bahwa : „Suatu front persatuan bisa mempunyai arti revolusioner hanya djika dan kalau ia tidak menghalangi Partai Komunis untuk mendjalankan pekerdjaan politik dan organisasinja jang bebas, hanya djika ia tidak merintanginja untuk mengorganisasi klas proletar menjadi kekuatan politik jang berdiri sendiri, membangkitkan kaum tani melawan kaum tuantana, ... dan dengan demikian mempersiapkan sjarat² jang diperlukan untuk hegemoni dari proletariat”.

Kita telah mengalami bagaimana praktek dari lepasnja kebebasan Partai kita dalam front persatuan nasional

jaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1948. Kesalahan pokok jang menjebabkan lepasnja kebebasan Partai pada waktu itu jalah kesalahan dilapangan politik dan organisasi setjara bersamaan jang saling pengaruh-mempengaruhi. Pada waktu itu kaum Komunis setjara sukarela telah mempertahankan bentuk ilegal dari Partai disamping adanja Partai jang legal, jang ditempatkan pada tempat jang tidak semestinja, dan mendirikan Partai² klas buruh lainnja, jalah PBI (Partai Buruh Indonesia) dan Partai Sosialis. Kesalahan dilapangan organisasi ini, seperti diterangkan didalam „Djalan Baru”, telah menjebabkan PKI sebagai Partai dan organisasi samasekali tidak mewujudkan kekuatan jang berarti, dan dalam politik menjebabkan terlampau banjak memberikan konsesi kepada imperialisme dan klas burdjuis.

Kesalahan fundamentil dari Partai jang menondjol pada waktu itu jalah kesalahan dilapangan politik, jaitu kesalahan mengenai persetudjuan Linggardjati dan Renville.

Pada waktu itu kesalahan fundamentil dilapangan organisasi tidak menondjol dimata umum, karena ia tidak difahami oleh umum dan djuga oleh kebanyakan anggota Partai sendiri. *Sumber dari kesalahan dilapangan organisasi ini terletak pada kesalahan pimpinan organisasi jang setjara sukarela menempatkan diri pada kedudukan ilegal atau semi-ilegal. Ini berarti setjara sukarela membatasi aktivitet dan menjempitkan lapangan bergerak dari Partai.* Sudah dengan sendirinja bahwa sebagai akibatnja jang wadjar jalah Partai tidak bisa mendjadi besar dan kuat. Adalah satu prinsip organisasi Partai Komunis bahwa ia tidak boleh *setjara sukarela* bekerdja ilegal atau semi-ilegal.

Dalam „Djalan Baru” lebih landjut ditundjukkan bagaimana kesalahan Partai dilapangan organisasi itu sangat menghambat pertumbuhan kesedaran politik dari massa Rakjat, baik buruh maupun tani, pemuda maupun wanita, massa pradjurit, dsb. Dalam hubungan dengan kaum buruh, misalnja, didalam „Djalan Baru” itu ditundjukkan: „Oleh karena sikap jang anti-Leninis dalam hal politik-organisasi ini, maka dilapangan serikat-buruhpun kaum Komunis dengan demikian telah sangat menghalangi tumbuhnja keinsjafan politik kaum buruh seumumnja sebagai pemimpin Revolusi Nasional. Kaum

Komunis jang memimpin gerakan buruh (serikatburuh) lupa, bahwa menurut Lenin serikatburuh itu adalah sekolahan untuk Komunisme. Melalaikan propaganda Komunisme dikalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sedarnja kaum buruh sebagai pemimpin revolusi nasional jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Berarti melupakan arti gerakan kaum buruh sebagai sumber jang terpenting bagi PKI untuk mendapat kader²nja". Dan mengenai kaum tani dinjatakan bahwa: „Pengaruh dari kesalahan dalam lapangan organisasi jang telah dilakukan oleh kaum Komunis dengan djelas dan terang nampak djuga dikalangan perdjjuangan tani, dimana pengaruh PKI djuga sangat lemah. Padahal kaum tani amat besar artinja sebagai sekutu kaum buruh dalam Revolusi Nasional. Dengan tidak adanja bantuan jang aktif dari kaum tani, Revolusi Nasional tentu akan kalah".

Djadi, dilepaskannja kebebasan Partai didalam front persatuan nasional berarti pada pokoknja dilepaskannja tugas mengorganisasi kaum buruh dan kaum tani setjara terbuka untuk mempersiapkan sjarat² jang diperlukan untuk hegemoni dari proletariat.

Klas burdjuis nasional dan orang² jang mengabdikan klas burdjuis, karena disatu fihak menindas klas buruh, atau karena ideologinja sebagai ideologi klas penghisap pada umumnja, dan difihak lain ditindas oleh imperialisme, maka didalam perdjjuangan ia mempunjai watak jang bimbang dan bermuka dua. Disatu fihak ia mau melawan imperialisme, tetapi difihak lain ia kuatir akan kelanjutannya dari revolusi jang bisa mendatangkan kemenangan bagi klas buruh.

Dalam menghadapi watak jang bimbang dan bermuka-dua dari burdjuasi nasional ini, kaum Komunis bisa membuat dua matjam kesalahan dalam hubungan dengan front persatuan nasional, jaitu kesalahan oportunisme kanan atau oportunisme kiri. Djika Partai Komunis menitikberatkan pada perlunja bersatu sadja dengan burdjuasi nasional tanpa melakukan perdjjuangan terhadap wataknya jang bimbang dan bermuka-dua itu, maka ia akan menjeleweng mendjalankan kesalahan oportunisme kanan. Tetapi sebaliknya, djika Partai Komunis lebih menitikberatkan pada perdjjuangan dan kurang melihat keharusannja untuk bersatu dengan burdjuasi nasional,

maka ia akan menjeleweng menjalankan kesalahan oportuniste kiri.

Oleh karena itu, ada dua prinsip jang harus kita pegang teguh dan kita djalankan setjara bersamaan didalam melaksanakan politik front persatuan dengan burdjuasi nasional, jaitu jang *pertama*, *prinsip bersatu*, dan jang *kedua*, *prinsip berdjuaug*. Atau djika kedua prinsip ini dipersatukan ia menjadi prinsip „bersatu dan berdjuaug”.

Karena prinsip berdjuaug disini ditudjukan tidak terhadap musuh jang harus dihantjurkan, melainkan terhadap sekutu jang harus ditarik, maka didalam praktek ia harus berupa kritik jang bersifat mendidik untuk merubah. Bagaimanapun djuga tadjamnja kritik itu, ia harus tidak boleh melewati batas, jaitu batas² front persatuan.

Menurut pengalaman, tjara melakukan kritik jang tidak tepat terhadap kelemahan² burdjuasi nasional bisa berakibat sangat merugikan politik front persatuan nasional. Kritik jang tidak tepat bisa membantu mendorong burdjuasi nasional bertindak reaksioner.

Kita ambillah salahsatu pengalaman jang dimuat didalam Resolusi „Djalan Baru”. Mengenai pemerintah pada waktu itu dikemukakan: „Ternjata bahwa didalam 6 bulan jang belakangan ini, sedjak pimpinan negara dipegang oleh elemen² burdjuis komprador, tumbuhnja politik jang reaksioner berdjalan dengan tjepatnja. Malahan pada beberapa bulan jang belakangan sudah tampak tanda², bahwa politik pemerintah jang reaksioner itu akan tumbuh ketinggian kontra-revolusioner”. Dan mengenai sebab²nja, antara lain dinjatakan: „Hal ini sebagian disebabkan karena agitasi dan propaganda dari fihak kaum Komunis untuk menjedarkan massa Rakjat pekerdja tentang kekeliruan² politik pemerintah, disana-sini telah didjalankan dengan tjara jang kurang bidjaksana, hingga menjinggung perasaan”.

Disamping harus pandai mengemukakan kritik setjara tepat terhadap kebimbangan dan kekeliruan² politik dari klas burdjuis nasional, kita harus djuga bisa setjara tepat mendorong dan mempopulerkan sikap dan tindakan jang madju dari kalangan burdjuasi nasional. Dengan tjara mengkritik jang tepat terhadap kebimbangan dan kesalahan², dan mendorong serta memudji jang baik dari

kalangan burdjuasi nasional, maka setiap pernyataan dari kelas buruh dan partainya akan mempunyai daya yang meyakinkan dan berarti memegang inisiatif. Dalam melakukan tugas ini satu soal yang sangat penting untuk selalu diingat, ialah perubahan keadaan: kapan dan dalam hal apa harus ditekankan pada kritik, dan kapan serta dalam hal apa harus ditekankan pada dorongan. Tetapi bagaimanapun juga, didalam mengajukan kritik harus selalu disertai dengan dorongan dan harapan yang berarti memberikan pintu kepada mereka untuk menempuh jalan perbaikan.

Sikap yang tepat menghadapi watak yang bimbang dan bermuka-dua dari burjuasi nasional sangat besar bantuannya dalam mewujudkan front persatuan nasional. Tetapi ada syarat² yang menentukan untuk berhasilnya Partai Komunis mempertahankan kebebasannya dan sekaligus menarik kelas burjuis nasional sebagai sekutu didalam front persatuan nasional. Syarat² itu ialah:

Pertama, Partai harus disatu fihak, terus-menerus berkerja untuk memperluas dan mengkonsolidasi persekutuan buruh dan tani dan difihak lain dengan teguh dan pandai melakukan perjuangan melawan imperialisme dan kekuatan² reaksioner didalam negeri. Dengan kekuatan progresif yang besar, serta dengan teguh dan pandai melakukan perjuangan melawan imperialisme dan kekuatan² reaksioner didalam negeri, maka kelas burjuis nasional akan bisa ber-angsur² ditarik untuk solider dan didorong untuk lebih teguh sikapnya didalam melawan imperialisme. Senjata yang paling ampuh untuk menarik solidaritet dan mendorong sikap yang lebih teguh dari burdjuasi nasional ialah pukulan² yang tepat dan berhasil terhadap kekuatan² kaum imperialis dan kakitangannya didalam negeri. Disinilah letak kegunaannya dalam memberikan pukulan² yang tepat terhadap kaum imperialis dan kekuatan² reaksioner dalam negeri untuk menarik kelas burjuis nasional kedalam front persatuan nasional.

Kedua, memperhatikan kepentingan² yang masuk-akal dari kelas burjuis nasional. Misalnja, kaum buruh tidak saja sangat memperhitungkan kekuatan modal dari kaum kapitalis nasional dalam hubungan dengan tuntutan² perbaikan nasibnja, tetapi juga dengan kuat mem-

bantu perjuangan mereka untuk mendapatkan perlin-
dungan dan dalam melawan persaingan asing.

Ketiga, meluaskan kekuatan² jang madju dikalangan kaum burdjuis nasional dan mendorong mereka jang termasuk golongan tengah supaya mendjurus kekiri, membangkitkan mereka jang terbelakang dan mengisolasi mereka jang kepalabatu. Dalam perjuangan ini, perlu memperhatikan perbedaan antara kaum intelektual burdjuis dan kaum kapitalis nasional. Kaum intelektual burdjuis biasanja tidak mempunyai alat produksi, mereka umumnya bisa menjadi lebih patriotik dan lebih mempunyai pengertian politik, disamping mereka adalah tulang punggung jang menguasai ilmu modern dan kebudayaan. Pengaruh mereka adalah besar dikalangan kaum kapitalis nasional, oleh karena itu sangat penting untuk pertama² berusaha menarik mereka kefihak Rakjat pekerdja.

Partai² jang termasuk demokratis diluar Partai Komunis adalah merupakan perwakilan dari klas burdjuis nasional dan burdjuis ketjil. Oleh karena itu, partai² ini bisa dan harus dijadikan saluran untuk mengatur hubungan dan menarik klas burdjuis nasional kedalam front persatuan. Tetapi disamping partai² ini harus djuga ditjari saluran dengan melalui grup² dan tokoh² non-partai jang demokratis.

Dari semua keterangan diatas djelaslah, bahwa bisa tertjipta atau tidaknja front persatuan dengan burdjuasi nasional adalah, disatu fihak, bergantung kepada sikap burdjuasi nasional sendiri, dan difihak lain, bergantung kepada tepat atau tidaknja politik jang dijalankan oleh Partai Komunis. Bisa terdjadi bahwa politik Partai Komunis sudah tepat, tetapi tekanan kekuatan kaum imperialis begitu rupa besarnja sehingga klas burdjuis nasional bisa menjerah dan meninggalkan front persatuan nasional. Sebaliknya bisa djuga terdjadi bahwa faktor² objektif sangat menguntungkan untuk menggalang front persatuan dengan burdjuasi nasional, tetapi Partai Komunis mendjalankan politik jang salah dan tidak tepat, sehingga burdjuasi nasional djuga lari kefihak reaksi dan memusuhi front persatuan dengan klas buruh.

Tetapi bagaimanapun djuga dapatlah kita tarik kesimpulan dari pengalaman², bahwa jang terutama menentukan berhasilnja penggalangan front persatuan nasional itu ialah imbangan kekuatan, baik setjara nasional

maupun internasional. Berdasarkan kesimpulan ini kita bisa menjatakan bahwa faktor² untuk penggalangan front persatuan nasional dinegeri kita masih tetap menguntungkan. *Pertama*, kita mempunyai Partai Komunis jang tjukup besar pengaruhnja. Ini berarti, bahwa kekuatan progresif sudah agak besar. *Kedua*, imbalanced kekuatan setjara internasional sekarang ini sudah lebih menguntungkan kekuatan progresif pada umumnja. *Ketiga*, tradisi persatuan tjukup kuat dinegeri kita. Djadi, tinggal lagi menambah satu faktor subjektif, jaitu faktor ketjakangan dan ketepatan orang² Komunis dalam mendjalankan politik front persatuan.

Djika bisa digalang front persatuan jang lama dan teguh dengan burduasi nasional sampai selesainja :evolusi nasional-demokratis, maka sesudah selesai nanti front persatuan ini akan lebih mempunyai sjarat² untuk bisa diteruskan setjara menguntungkan bagi pembangunan Sosialisme.

IV. FAKTOR AGAMA DAN SUKU-BANGSA DALAM FRONT PERSATUAN NASIONAL

Seperti sudah diterangkan diatas, pelaksanaan politik front persatuan nasional terutama ditjajikan dasarnya dalam persamaan kepentingan melawan kekuasaan imperialisme asing untuk kemerdekaan nasional jang penuh. Djadi, pokoknja jang bisa dan harus dijadikan dasar untuk mempersatukan majoritet dari nasion dalam front persatuan nasional ialah berbagai tuntutan gerakan nasional jang pada umumnja berhubungan dengan sjarat² jang mendjadi tjiri dari nasion (bahasa, wilajah, ekonomi dan kebudayaan).

Tetapi ada faktor lain jang penting djuga, jang bisa mempengaruhi pelaksanaan politik front persatuan dalam arti bisa membawa kebulatan atau keretakan dalam front persatuan nasional, jaitu faktor agama dan sukubangsa.

Meskipun Partai sudah bisa dengan tepat mengadakan politik front persatuan nasional, tetapi djika tidak disertai dengan sikap politik Partai jang tepat mengenai agama dan sukubangsa, maka pelaksanaan politik front persatuan nasional itu akan mendjadi sangat sukar dan bisa mendjadi kurang berhasil.

Agama jang paling berpengaruh di Indonesia ialah

Islam dan kemudian Kristen (Protestan) dan Katolik. Bagi massa Rakjat yang masih terbelakang, perbedaan agama ini sudah bisa menjadi alasan untuk tidak bersatu atau mengurangi eratnja persatuan, dan menutupi kenjataan adanya persamaan kepentingan dilapangan ekonomi dan politik. Pendeknja, ia bukan saja bisa menjelimi dan mengaburkan perjuangannya kelas, tetapi juga bisa merenggangkan persatuan nasional. Kita bisa melihat hal ini, misalnja, dari kenjataan adanya organisasi massa yang ter-pisah² didalam satu lapangan kerja yang terutama hanya didasarkan atas perbedaan agama. Lebih² lagi karena kaum imperialis dan kakitangannya memang dengan sengaja mempergunakan agama untuk memetjah-belah massa Rakjat.

Sedar akan besarnya pengaruh agama, terutama agama Islam, dikalangan massa Rakjat, dalam hubungannya dengan pelaksanaan politik front persatuan Kawan Aidit dalam suatu laporan Politbiro kepada Sidang Pleno CC telah memberikan analisa mengenai pembagian masyarakat kita menurut pengaruh aliran² politik. Dalam laporan itu diterangkan: „Pada umumnya Rakjat kita dipengaruhi oleh tiga aliran politik, jaitu aliran Komunis, Nasionalis dan Islam. Inilah aliran² yang meresap sampai kekalangan Rakjat banjak. Aliran sosialis kanan, sekarang terkenal dengan nama aliran 'soska' (sosialis kanan) yang di Indonesia diwakili oleh PSI, tidak mempunyai pengikut yang luas dikalangan Rakjat banjak. Tetapi dengan ini tidak berarti bahwa aliran 'soska' tidak perlu mendapat perhatian.

„Disamping aliran Komunis dengan tradisi revolusionernya yang gemilang dan heroik, aliran Nasionalis dan Islam juga mempunyai tradisi dalam masyarakat kita. Aliran Nasionalis dan partai politik Nasionalis mulai dikenal oleh Rakjat Indonesia sedjak permulaan abad ke-20, ia dikenal ber-sama² dengan lahirnya gerakan nasional dinegeri kita. Agama Islam sudah dikenal ratusan tahun, sedjak agama Islam datang di Indonesia, tetapi partai politik Islam baru dikenal juga sedjak permulaan abad ke-20. Politik dari partai² Nasionalis dan partai² Islam tergantung pada kelas² dari orang² yang memimpin partai² itu”.

Berdasarkan kenjataan ter-bagi²nja masyarakat menurut pengaruh aliran politik, dimana Islam merupakan

salahsatu daripadanya, Kawan Aidit didalam laporan Politbiro jang lain kepada Sidang Pleno CC menjatakan, bahwa PKI menghargai sembojan jang djuga diandjurkan oleh Bung Karno, jaitu sembojan tentang „kerdja-sama kaum Agama, Nasionalis dan Komunis”, karena sembojan ini tjotjek dengan kebutuhan jang mendesak dari Rakjat Indonesia sekarang, jaitu persatuan.

Dengan mengakui ter-bagi²nja massa Rakjat menurut aliran² politik, hal ini samasekali tidak mengurangi kebenaran bahwa pada achirnja persamaan kepentingan materiil dari massa adalah merupakan pertalian jang lebih kuat daripada pertalian menurut aliran² politik. Kawan Aidit mengatakan: „Pengalaman menundjukkan, bahwa massa Nasionalis dan massa Islam tidak sedikit jang setudju pada Partai kita. Djuga massa Nasionalis dan massa Islam jang tidak setudju dengan kita, dan malahan mungkin masih menentang kita, sangat banjak jang melihat adanja persamaan kebutuhan dengan massa Komunis. Satu kenjataan jang tak dapat dibantah, bahwa antara massa Komunis dengan massa Nasionalis dan Islam lebih banjak terdapat titik² pertemuan daripada antara orang² jang memimpin mereka. Oleh karena itu-lah, perundingan satu dengan lain, saling mendekati dan mengadakan persetudjuan² dalam banjak hal adalah mungkin dan djalan inilah jang harus kita tempuh. Kesinilah perhatian harus kita tjurahkan, sebagai salahsatu usaha kita jang penting untuk lebih meluaskan persatuan semua kekuatan nasional.”

Bagi kita aliran Nasionalis sudah terang dasar klasnja Tetapi dengan aliran Islam orang bisa keliru se-akan² aliran Islam itu mempunjai dasar klas jang tersendiri atau tidak berdasarkan klas samasekali. Hal ini adalah tidak benar.

Djadi, apakah alasannja sampai kita bisa menghargai sembojan front persatuan nasional jang didasarkan persatuan aliran² politik, dimana termasuk didalamnja aliran Islam? Hal ini tidak lain adalah karena didorong oleh kepentingan Partai untuk menundjukkan sikapnja jang menghormati setiap agama, dan dalam hal ini agama Islam jang paling besar pengaruhnja dikalangan massa Rakjat.

■ Sikap menghormati tiap agama ini sudah tentu tidak

berarti bahwa kita tidak harus dengan djelas menjatakan sikap kita jang menentang digunakannya perbedaan agama untuk memetjah-belah persatuan nasional.

Mengenai pentingnja faktor sukubangsa dalam hubungan dengan front persatuan nasional, diwaktu jang lalu masih kurang tjukup mendapat perhatian dan sering terdjadi salah-faham.

Karena selama ini jang populer dan terus dipopulerkan ialah sembojan bahwa kita adalah satu bangsa dalam arti satu nasion, maka mengemukakan masalah suku-bangsa dianggap sebagai hendak mem-bangkit²kan perasaan sukubangsa jang dianggapnya sudah lama tidak ada lagi.

Memang ada golongan jang dengan sengadja me-non-djol²kan persoalan sukubangsa hanya sekedar untuk mengadu-domba sukubangsa jang satu dengan lainnja dan untuk memetjah-belah persatuan nasional Rakjat Indonesia.

Dulu pemerintah Hindia Belanda djuga mendjalankan politik petjah-belah dengan mengadu-domba sukubangsa. Kaum kolonialis Belanda memupuk perbedaan² diantara sukubangsa jang satu dengan lainnja djustru untuk mempertentangkannya satu sama lain. Tetapi karena penindasan dan penghisapan kaum kolonialis Belanda dulu dirasakan langsung lebih berat oleh seluruh Rakjat Indonesia sebagai satu nasion, maka pertentangan² jang ditjip-takan oleh Belanda diantara sukubangsa² itu bisa dikalahkan oleh pertentangan antara seluruh Rakjat Indonesia sebagai kesatuan dengan kaum kolonialis Belanda.

Sesudah Indonesia memperoleh kemerdekaan politik, keadaan mendjadi agak berbeda dimana Belanda tidak berkuasa lagi setjara langsung. Kaum imperialis dengan menggunakan kaum burdjuis komprador sampai batas² tertentu berhasil mem-bangkit²kan semangat separatisme dengan menunggangi ketidakpuasan Rakjat di-daerah². Mereka mengabui mata Rakjat dengan menutupi kenyataan, bahwa perbedaan diantara satu daerah dengan lainnja, terutama dalam hal perbedaan madju atau terbelakangnja daerah² atau sukubangsa² itu, adalah sebagai akibat politik kolonial Belanda selama ratusan tahun di Indonesia.

Adalah wadjar bahwa sesudah Indonesia mentjapai

kemerdekaan politik, Rakjat mengharapkan perbaikan penghidupan setjara lebih tjepat. Karena memang kemerdekaan politik adalah merupakan sendjata dan harus dijadikan sendjata untuk memperbaiki penghidupan Rakjat. Tetapi sudah terang, bahwa apa jang dinamakan daerah bergolak, atau pertentangan antara daerah dengan pusat, adalah terutama ditimbulkan oleh politik imperialis dan keserakahan tokoh² lapisan atas dari daerah² atau sukubangsa jang hendak menggunakan kemerdekaan politik sekarang ini untuk berkuasa sendiri dan memperkaja diri sendiri.

Sjarat mutlak untuk bisa mengadakan perbaikan penghidupan Rakjat setjara radikal dan memulai pembangunan jang sungguh² untuk kepentingan Rakjat diseluruh daerah ialah likwidasi sampai ke-akar²nja kekuasaan ekonomi imperialis dan sisa² feodalisme. Tetapi kenjataannja, pemimpin² separatis dan pemberontak „PRRI”-Permesta jang selalu menggembar-gemborkan sembojan pembangunan daerah samasekali bukannya membawa Rakjat untuk berdjjuang melawan imperialisme dan tuantanah, tetapi mereka malahan bersatu dan mendjalankan politik kaum imperialis dan tuantanah.

Berbeda dengan kaum separatis, kalau kita kaum Komunis mengemukakan persoalan sukubangsa, maka sebabnja ialah djustru karena kita mengetahui adanya perbedaan² diantara sukubangsa satu dengan lainnja, baik dalam hal besar ketjilnja, dalam bahasanja, dalam kebudajaannja maupun adat-istiadatnja. Perbedaan² ini tidak perlu mendjadi bahan perpetjahan asal sadja dipakai prinsip hak sama dan saling menghormati diantara semua sukubangsa dengan tidak memandang besar-ketjilnja dan madju atau terbelakangnja. Djika kenjataan perbedaan² sukubangsa ini tidak diperhatikan dan tidak ditjarikan djalan pemetjahan jang tepat, maka perbedaan² itu akan tumbuh mendjadi benih pertentangan dan perpetjahan dan bisa meretakkan, bahkan bisa menghancurkan samasekali persatuan nasional Rakjat Indonesia.

Bagaimanakah pelaksanaan dari politik hak sama dan saling menghormati diantara semua sukubangsa itu?

Didalam suatu laporan Politbiro kepada Sidang Pleno CC, Kawan Aidit menerangkan : „Pelaksanaan daripada politik hak sama bagi semua sukubangsa adalah politik otonomi bagi sukubangsa² dibawah pemerintah jang ber-

sifat kesatuan. Hak otonomi berarti hak mengurus-soal² sendiri bagi sukubangsa², misalnja berhak mengurus soal² politik dan ekonomi dalam lingkungan sukubangsa masing², berhak memakai bahasa masing² disamping bahasa Indonesia dan berhak mengembangkan kebudayaan masing². Politik otonomi sukubangsa inilah satu²nja politik jang dapat memetjahkan masalah sukubangsa²".

Mengenai apa jang dinamakan otonomi di Indonesia, Kawan Aidit mendjelaskan: „Kenjataan sekarang menundiukkan, bahwa soal otonomi jang sekarang banjak dibitjarakan bukanlah otonomi jang berdasarkan suku-bangsa, akan tetapi berdasarkan daerah administratif dan disebut 'otonomi daerah'. Pembagian administratif pemerintahan sekarang pada pokoknja masih meneruskan pembagian administratif zaman kolonial dulu. Dalam rangka program tuntutan sekarang, PKI dapat menjetudjui 'otonomi daerah', diadi belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah² itu diadakan pemilihan DPRD² setjara demokratis, dan dibentuk DPD² berdasarkan perwakilan berimbang. Tetapi ini adalah pemetjahan sementara selama belum dibentuk otonomi² berdasarkan suku-bangsa.

„Djadi, kita tidak boleh berhenti sampai pada 'otonomi daerah' sadja. Bersamaan dengan menerima 'otonomi daerah', kita harus menjelidiki dan menjimpulkan persoalan² sukubangsa², misalnja soal batas² daerah dimana sesuatu sukubangsa hidup, soal kesatuan bahasa dan kebudayaan dari tiap² sukubangsa, dsb. Berdasarkan hasil² penjelidikan dan kesimpulan ini ber-angsur² kita mendirikan otonomi² berdasarkan sukubangsa², sesuai dengan kepentingan seluruh bangsa".

Selanjutnja diterangkan oleh Kawan Aidit bahwa: „Dalam memetjahkan masalah sukubangsa kita harus mentjegah timbulnja perasaan tinggihati pada sukubangsa jang besar, kita harus mentjegah sukubangsa besar-isme. Djuga kita harus mentjegah sukubangsa jang besar dan jang sudah lebih maju memandang rendah sukubangsa² lainnja dan memaksakan keinginannja sekalipun mungkin dengan maksud untuk memajukan sukubangsa² lainnja itu. Pendeknja, tiap² sukubangsa harus maju dengan tiada paksaan dari sukubangsa lain. Sukubangsa jang sudah maju harus mempunyai perasaan berkewajiban

membantu sukubangsa² lain, tetapi pelaksanaan daripada kewadjan ini tidak boleh dengan memaksa. Sukubangsa jang besar harus menghormati sukubangsa² jang ketjil. Djikalau ada kekurangan² didalam pekerdjaan mengatur negeri maka jang per-tama² harus mengadakan selfkritik jalah sukubangsa jang besar dan sudah madju.

„Dikalangan sukubangsa² ketjil kita harus mentjegah timbu'nja sukubangsa-isme jang sempit, jang sifatnja tidak mau menerima segala sesuatu dari sukubangsa lain. Sukubangsa-isme sempit membikin lambat kemandjiaan sukubangsa itu sendiri. Disamping itu sukubangsa-isme sempit mudah digunakan oleh kaum imperialis untuk mengadu-domba antara sukubangsa² dan untuk memetjah-belah persatuan Rakjat Indonesia. Ini berarti memetjah-belah dan sangat memperlemah kedudukan Republik Indonesia jang bersifat kesatuan. Djuga perasaan merasa ketjil-diri harus ditjegah dikalangan sukubangsa² tersebut karena perasaan ini djuga merupakan perintang bagi kemandjiaan sukubangsa² jang bersangkutan”.

Dalam hubungan dengan pekerdjaan front persatuan nasional, harus djuga kita masukkan pekerdjaan dikalangan minoritet keturunan asing. Tentang ini Kawan Aidit mengatakan: „Disamping masalah sukubangsa² ada lagi masalah lain jang hampir sama persoalannya, jaitu masalah minoritet keturunan asing, misalnja keturunan Arab, Eropa dan Tionghoa. Golongan minoritet ini berbeda dengan sukubangsa², karena minoritet keturunan asing ini walaupun mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri, tetapi tidak mempunyai daerah tempat tinggal jang tertentu. Oleh karena itu pemetjahan masalah minoritet keturunan asing lebih sukar. Tetapi ini tidak berarti bahwa soal ini tidak bisa dipetjahkan. Pemetjahan soal ini djuga hanya bisa dengan politik hak sama, jaitu hak sama semua warganegara. Djadi soalnya jalah, dengan konsekwen mendjalankan apa jang tertjantum dalam UUD tentang haksama bagi semua warganegara.

„Berhubung dengan pemetjahan masalah minoritet keturunan asing, disatu pihak harus ditjegah timbulnja nasionalisme sempit dikalangan majoritet warganegara 'bumiputera'. Jang terachir ini harus menghormati minoritet warganegara keturunan asing. Difiihak lain harus dihilangkan rasa superior (tinggihati) golongan atas daripada minoritet keturunan asing jang dizaman pendja-

djahan memang dipupuk oleh kaum pendjadjah untuk dapat diadu-dombakan dengan mayoritas 'bumiputera'. Pendidikan patriotisme Indonesia, pendidikan tjinta tanahair dan tjinta Rakjat Indonesia, harus diperdalam dan diperluas dikalangan minoritet keturunan asing. Ini tidak berarti bahwa pendidikan patriotisme Indonesia dikalangan warganegara 'bumiputera' sudah tidak diperlukan".

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam pekerjaan front persatuan faktor agama dan sukubangsa ini seringkali terjalin menjadi satu. Suatu sikap yang tidak tepat mengenai sesuatu agama yang kebetulan dianut oleh mayoritas dari massa sesuatu sukubangsa, bisa dianggap sebagai langsung menyinggung juga seluruh sukubangsa itu. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa merasa tersinggung kepertjajaan agamanya jika perasaan sukubangsanya tersinggung.

Itulah sebabnya tokoh² agama atau sukubangsa yang meskipun kadang² politiknya sudah dikenal reaksioner, masih juga belum ditentang oleh massa Rakjat yang bersamaan agama atau sukubangsanya.

Oleh karena itu, membangkitkan kesadaran politik dari massa yang masih terbelakang, yang ada dibawah pengaruh tokoh² agama atau sukubangsa adalah sangat sukar jika tidak mendapat bantuan dari tokoh² itu, apalagi jika mendapat tentangan dari mereka. Oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan politik front persatuan nasional, adalah juga sangat penting bagi kita untuk berusaha menarik dan bekerjasama dengan tokoh² agama dan sukubangsa dari pusat sampai ke-daerah².

Dengan menjatakan pentingnya usaha menarik dan bekerjasama dengan tokoh² agama dan sukubangsa, tidaklah berarti bahwa pekerjaan membangkitkan massa yang masih terbelakang dan menganut sesuatu agama di-daerah² sukubangsa harus selalu dengan perantaraan tokoh² agama dan sukubangsa. Yang paling penting dan menentukan dalam hal ini ialah sikap dan pandangan kita yang tepat mengenai agama dan sukubangsa.

Seperti sudah diterangkan diatas, mengenai agama, sikap kita ialah menghormati setiap kepertjajaan agama. Dengan sikap menghormati kepertjajaan agama kita bisa memegang inisiatif yang besar dilapangan politik. Sikap

jang sebaliknya akan menjebakkan kita berkedudukan pasif dilapangan politik.

Salahsatu tjontoh jang barangkali bisa mejakinkan dalam hal ini ialah sikap Partai kita mengenai Pantjasila. Sebab, kita bisa melihat dengan njata betapa besar arti politik dan akibat bagi kaum reaksioner jang biasa menggunakan agama sebagai kedok dalam perdjuaan politiknya, seperti kaum reaksioner dari Masjumi, dengan sikap Partai kita jang menerima Pantjasila. Dan dasar pertimbangan jang penting untuk mengambil sikap menerima Pantjasila ini ialah antara lain karena sikap kita jang menghormati setiap kepertjajaan agama.

Mengenai soal sukubangsa, seluruh keterangan diatas adalah dimaksudkan untuk memberikan kejakinan bahwa memang soal sukubangsa dan minoritet keturunan asing merupakan persoalan jang serius jang harus mendapatkan pemetjahannya setjara tepat. Adalah keliru dan berbahaya anggapan jang menjatakan se-akan² tidak ada soal² sukubangsa dan minoritet keturunan asing, bahwa adanya soal² ini hanya karena ditimbulkan oleh politik kita sendiri.

Kenjataan bahwa kaum reaksioner dari Masjumi-PSI telah dapat menggunakan sentimen sukubangsa untuk menimbulkan gerakan separatis dan pemberontakan „PRRI“-Permesta, dan menggunakan sentimen rasial anti-Tionghoa untuk merusak kesatuan kewarganegaraan Republik Indonesia, hendaknja kenjataan² ini bisa menghapuskan anggapan² jang keliru jang mengabaikan persoalan sukubangsa dan minoritet keturunan asing.

Satu²nja politik jang dapat memetjahkan masalah sukubangsa ialah politik otonomi sukubangsa sebagai pelaksanaan dari prinsip hak sama dan saling menghormati diantara semua sukubangsa dengan tidak memandang perbedaan besar-ketjilnja dan madju atau terbelakangnja. Sedang untuk memetjahkan masalah minoritet keturunan asing ialah pada pokoknja dilaksanakan setjara konsekwen dan sepenuhnya prinsip hak sama dari semua warganegara dengan tidak memandang asal keturunan atau kejakinan politik dan kepertjajaan agamanya.

Aspirasi atau tjita² setiap sukubangsa, misalnja keinginan untuk melihat kemandjuan kebudayaan sukubangsanya dan untuk melihat adanya pemimpin² Rakjat dan

pemimpin² pemerintahan, se-tidak²nja pemerintahan daerah, dari sukubangsanya hanya bisa dipenuhi dengan memberikan otonomi sukubangsa. Djika otonomi sukubangsa ini dilaksanakan dibawah Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia, maka hasilnya tidak bisa lain ialah persamaan kedudukan, saling pertjaja dan kerdjasama serta persatuan yang lebih erat dan lebih teguh lagi dari semua sukubangsa dalam kesatuan nasyon Indonesia.

Karena dibawah kekuasaan dan dalam tingkat perdjuaan sekarang ini belum bisa dilaksanakan otonomi sukubangsa, maka sudah akan memadai jika otonomi daerah berdasarkan Undang² No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok² Pemerintahan Daerah dilaksanakan sepenuhnya dan dengan konsekwen. Djika otonomi daerah ini sungguh² dilaksanakan setjara demokratis, maka hal ini sebenarnya berarti pendemokrasian pemerintahan daerah. Dengan pemerintahan daerah yang demokratis, dimana ada DPRD dan DPD-nja yang dipilih oleh Rakjat di daerah masing², maka tuntutan² Rakjat daerah untuk se-bagiannya bisa ditampung dan dipetjahkan oleh Rakjat daerah sendiri.

Pada umumnya apa yang dinamakan tuntutan² daerah atau tuntutan² Rakjat daerah, pada hakekatnya adalah tuntutan² sukubangsa. Dengan demikian djelaslah, bahwa otonomi daerah atau pendemokrasian pemerintahan daerah sesungguhnya bisa merupakan sendjata yang baik untuk melawan hasutan² kaum separatis dan pemberontak yang selalu menggembar-gemborkan sembojan kosong tentang memperhatikan kepentingan daerah atau tentang pembangunan daerah.

Oleh karena itu, adalah keliru dan akan mentjapai hasil yang sebaliknja, djika ada orang yang disatu pihak, menghendaki kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih teguh, tetapi, difihak lain, tidak menjetudjui dan malahan merintangi pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dikehendaki oleh Undang² No. 1 Tahun 1957.

Untuk bisa melaksanakan dengan baik politik mengenai sukubangsa dan minoritet keturunan asing, diperlukan politik pemeliharaan dan penempatan kader sukubangsa dan kader pusat setjara tepat, baik didalam Partai, didalam organisasi² massa Rakjat, maupun didalam pemerintahan.

Terhadap kader sukubangsa, kita harus memberikan perlakuan dan pemeliharaan yang istimewa dalam hal mengutamakan kesempatan beladjar bagi mereka. Kita harus tidak boleh ragu² dalam memberikan kesempatan akan berakibat mengganggu pkerdjaannja untuk sementara waktu.

Mengenai kader dari pusat yang akan ditempatkan di-daerah² sukubangsa, maka sjarat²nja yang penting, disamping ketjakapan dan keuletan, ialah terutama keichlasan dan kedjudjuran untuk membantu daerah. Sjarat² ini sungguh diperlukan supaya penempatan kader dari pusat bisa berhasil baik dengan mentjiptakan kerdjasama yang baik dan persatuan yang erat antara kader yang dari pusat dan kader daerah.

Sudah tentu, difihak lain, diperlukan djuga sjarat² keichlasan dari kader² daerah (sukubangsa) untuk menerima bantuan kader² dari pusat.

Berbitjara tentang sjarat² penempatan kader dari pusat di-daerah², dalam hal ini yang kita maksudkan bukan saja penempatan kader dari pusat di Daerah² Besar, tetapi djuga penempatan kader² dari „pusat” Daerah Besar di-daerah² dalam lingkungan Daerah Besar itu sendiri.

Dalam hubungan dengan pemetjahan masalah bangsa² minoritet di Tiongkok, Mau Tse-tung pernah mengatakan : „Adalah mustahil untuk memetjahkan soal bangsa² minoritet dengan konsekwen dan mengisolasi samasekali kaum reaksioner dari berbagai bangsa minoritet djika tidak ada sedjumlah besar kader Komunis yang berasal dari bangsa² minoritet”.

Apa yang dikatakan oleh Mau Tse-tung ini sepenuhnya berlaku bagi Partai kita dan pemetjahan soal sukubangsa² dinegeri kita. Disinilah pentingnja politik pemeliharaan dan penempatan kader sukubangsa yang setjara tepat.

V. SOAL ORGANISASI FRONT PERSATUAN NASIONAL

Djika kita sampai merasa perlu mengemukakan soal organisasi front persatuan nasional disini, maka sebabnja bukanlah karena soal organisasi ini merupakan soal yang sama penting dan fundamentilnja seperti soal² lain dari

front persatuan nasional jang sudah diterangkan diatas.

Soal front persatuan nasional memang per-tama² bukanlah soal organisasi, melainkan, seperti sudah diterangkan dalam pendahuluan, adalah soal garis politik, soal taktik dari Partai.

Djadi, apakah maksudnja kita kemukakan djuga soal organisasi front persatuan nasional itu disini?

Maksudnja jalah hanya sekedar memberikan pendjelasan guna menghapuskan pengertian jang kaku dan formil mengenai organisasi, chususnja organisasi front persatuan nasional.

Untuk beberapa waktu sesudah adanja Resolusi „Djalan Baru”, dikalangan kita kaum Komunis agak luas djuga terdapat fikiran jang kaku dan formil mengenai organisasi front persatuan nasional.

Didalam „Djalan Baru” ada dinjatakan: „Walaupun kemudian mereka mulai sadar akan kepentingan Front Nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum faham sungguh² tentang hakekat Front Nasional dan tentang tjara membentuknja. Beberapa matjam bentuk Front Nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi selalu tinggal diatas kertas belaka, hanya berupa konvensi diantara organisasi² atau diantara pemimpin² sadja, sehingga diikalau ada sedikit perselisihan diantara pemimpin² Front Nasional itu lalu menjejabkan bubarnja”.

Selandjutnja dalam hubungan dengan bentuk atau organisasi Front Nasional, didalam „Djalan Baru” diterangkan: „Front Nasional jang tulen harus disusun dari bawah, semua anggota partai² jang sudah menjetudjui Front Nasional seharusnja memasukinja setjara individu. Selain daripada itu diberi djuga kesempatan kepada beribu orang jang tidak berpartai dan jang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komite² Front Nasional, baik didaerah maupun dipusat, harus dipilih setjara demokratis dari bawah. Front Nasional sematjam ini, sekali berdiri tidak akan mudah hantjur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpin² partai. Front Nasional sematjam itu memungkinkan djuga pengurangan perselisihan politik dan djuga memperketjil adanja oposisi sampai pada batas minimum”.

Dengan menafsirkan setjara berat sebelah apa jang dinjatakan didalam „Djalan Baru” itu, dikalangan kita telah timbul sematjam semangat anti, atau menjalahkan,

djika kita kaum Komunis menjetudjui dan turut dalam badan² kerdjasama diantara partai² dan organisasi² jang tidak memakai nama Front Nasional dan tidak beranggotakan setjara perseorangan, dan hanja merupakan pertemuan² diantara pimpinan²nja sadja. Kerdjasama² sematjam ini mau diremehkan begitu sadja, karena dianggapnja bukanlah merupakan Front Nasional. Menurut anggapaannja, jang dinamakan Front Nasional haruslah berupa organisasi jang memakai nama Front Nasional dan mempunyai keanggotaan setjara perseorangan.

Tafsiran sematjam ini mengenai Front Nasional jang diterangkan didalam „Djalan Baru” adalah tafsiran jang berat sebelah. Sebab, dengan demikian se-akan² „Djalan Baru” mengkritik kaum Komunis pada waktu itu hanja dalam hal belum faham sungguh² tentang tjara membentuk Front Nasional, dan bukannya per-tama² bahwa kaum Komunis pada waktu itu belum faham sungguh² tentang hakekat Front Persatuan Nasional.

Padahal dalam „Djalan Baru” itu sendiri, dalam kalimat jang menundjukkan kekurangan pengertian kaum Komunis tentang Front Persatuan Nasional pada waktu itu, djustru jang disebutkan per-tama² ialah bahwa „kaum Komunis belum faham sungguh² tentang hakekat Front Persatuan Nasional”.

Djuga didalam „Djalan Baru” ada diterangkan: „Oleh karena pada dewasa ini telah ada program nasional jang sudah disusun, disetudjui dan diterima pula oleh semua partai, maka tidak salah djika program nasional ini dipakai dengan segera sebagai dasar untuk mewujudkan Front Nasional”, dan bahwa „Front Nasional jang tulen harus disusun dari bawah”.

Apakah artinja ini?

Ini berarti bahwa Front Nasional jang tulen ialah Front Nasional jang dilahirkan oleh suatu program jang bisa mempersatukan dan membangkitkan aksi² bersama dari berbagai golongan massa Rakjat. Ini berarti bahwa kaum Komunis harus bisa merumuskan tuntutan² atau program jang mengenai kepentingan bersama dari berbagai golongan massa Rakjat, dan berdasarkan tuntutan² atau program itu mengadakan berbagai bentuk kerdjasama untuk melaksanakan aksi² bersama dari berbagai kalangan massa Rakjat dan mengenai berbagai lapangan, seperti lapangan ekonomi, politik, kebudajaan, dsb.

Oleh karena itu, seperti halnya wujud dari persekutuan buruh dan tani tidak harus dilihat dari adanya bentuk organisasi yang formil, yang mempersatukan kaum buruh dan kaum tani, melainkan harus dilihat dari adanya gerakan dan aksi² kaum tani yang terorganisasi, sebagai hasil dari pelaksanaan politik Partai Komunis mengenai kaum tani, yaitu sebagai hasil dari aktivitas kaum Komunis di desa yang setjara politik dan organisasi memberikan pimpinan kepada kaum tani, maka juga wujud daripada front persatuan nasional tidak pertama² harus dilihat dari adanya organisasi front persatuan nasional yang formil, yang mempunyai anggota² perseorangan dari kaum buruh, tani, burdjuis nasional, dsb., melainkan dari adanya gerakan Rakjat yang luas dari berbagai klas yang revolusioner, sebagai perwujudan daripada perjuangannya melaksanakan suatu program, atau bagian² dari program, yang meliputi kepentingan semua klas yang anti-imperialis untuk mentjapai kemerdekaan nasional yang penuh.

Front nasional dalam bentuk organisasi biasanya lahir pada waktu meningkatnya perjuangan nasional atau naiknya gelombang revolusi.

Program Partai kita adalah program yang meliputi kepentingan massa Rakjat dari semua klas yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Ia bisa dan harus kita pakai sebagai dasar untuk mengadakan kesatuan² aksi dari berbagai golongan massa Rakjat dan mengenai berbagai soal yang langsung menjangkut kepentingan massa Rakjat dan kepentingan nasional. Program Partai kita adalah Program yang seluruhnya atau bagian²nja bisa dijadikan dasar untuk mewujudkan front persatuan nasional. Sebab itu, Program Partai kita adalah sesungguhnya suatu program nasional, suatu program yang berisi tuntutan² yang meliputi kepentingan nasional.

Sudah jelaslah kiranya bahwa satu elemen pokok yang bisa menjadi semen persatuan dimana saja dan di waktu kapan saja ialah: kesatuan dalam aksi mengenai soal² yang langsung bersangkutan dengan kepentingan massa Rakjat.

Oleh karena itu, sesudah kita mempunyai politik atau program yang tepat, maka jalan untuk mentjapai persatuan dari berbagai golongan massa Rakjat dan untuk mentjapai persatuan nasional, bukanlah pertama² mentjarikan bagaimana bentuk organisasinya yang formil,

melainkan bagaimana mengemukakan politik atau program itu dengan kata² dan tjara² jang bisa difahami oleh berbagai golongan massa Rakjat, dengan menghindari pemakaian sembojan² kosong serta sikap angkuh: „terima atau tidak!”

Sikap sederhana dan rendah hati didalam mendjalankan politik front persatuan adalah sangat penting. Terhadap mereka jang mau bekerdjasama dengan kita, kita harus menundjukkan bahwa kita sungguh² mau beladjar dari mereka, bahwa kita tidak mau memaksakan pendapat² kita kepada orang lain. Disatu fihak, kita harus pertjaja bahwa orang lain djuga bisa melakukan sesuatu seperti kita, tetapi, difihak lain, kita tidak boleh mengharap orang lain sepenuhnya seperti kita. Kita harus mendidik diri kita untuk bisa bergaul dan bisa berunding dengan orang lain, dan disamping berusaha mendjadi teladan didalam kesetiaan mendjalankan putusan² bersama, kita harus menghindari memonopoli semua kedudukan atau pekerdjaan didalam front persatuan.

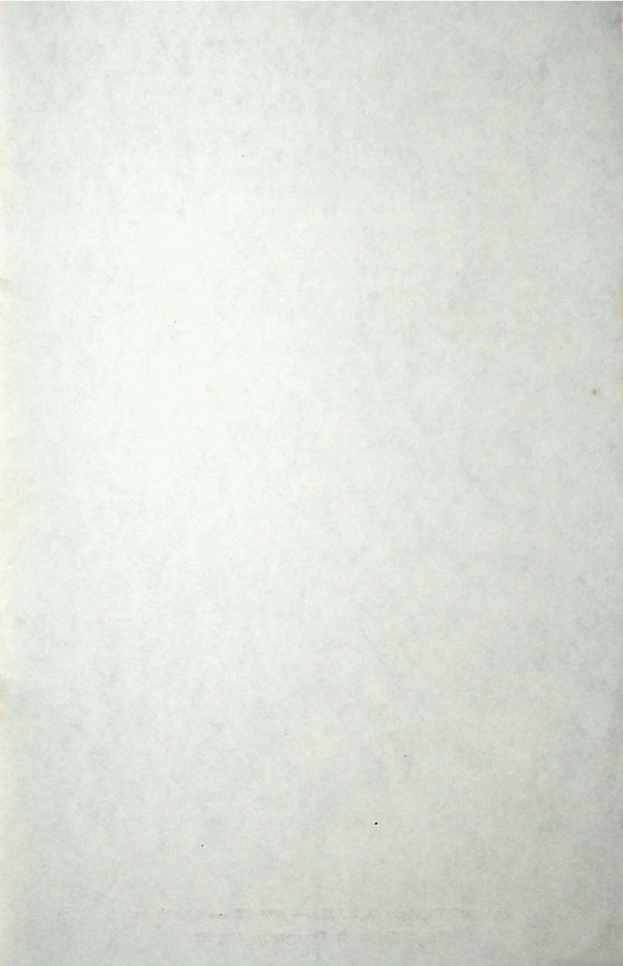
Untuk kesempurnaan tjara kerdja dalam mendjalankan politik front persatuan nasional, sangat pentinglah djika kita ingat dan kita djadikan pedoman dalam aktivitet kita se-hari², apa jang dikatakan oleh Mau Tje-tung, sbb.:

„Dalam bekerdja untuk massa kita harus mulai dari kebutuhan² mereka, tidak dari keinginan² kita, bagaimanapun djuga baiknja. Ada kalanja terdjadi bahwa massa setjara objektif membutuhkan perbaikan, tetapi setjara subjektif belum sadar untuk itu dan belum bersedia atau belum bertekad untuk melaksanakan hal itu mendjadi kenjataan; dalam hal ini kita harus sabar menunggu, dan melaksanakan perubahan itu, hanja djika, melalui pekerdjaan kita, kebanyakan daripada massa sudah mendjadi sadar akan kebutuhan itu dan bersedia serta bertekad untuk memulainja, sebab djika tidak demikian, kita sudah tentu akan mengisolasi diri kita sendiri dari massa.

„Pokoknja, pertama, apa jang sungguh² diperlukan oleh massa dan bukan apa jang kita duga diperlukan oleh mereka; dan kedua, apa jang massa bersedia dan bertekad untuk melakukannja, dan bukan apa jang kita bertekad untuk melaksanakannja atasnama mereka”.

Demikianlah, tulisan ini adalah suatu usaha jang kiranya bisa membantu untuk lebih memahami apa jang dimaksudkan dengan taktik front persatuan nasional oleh kaum Komunis, sebagai sendjata, baik untuk menjapai Pemerintah Gotongrojong, maupun Pemerintah Demokrasi Rakjat, seperti jang dirumuskan dalam Program PKI dan berbunyi sbb.:

„Hanja suatu front persatuan nasional jang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat jang se-luas²nja dan perdjuaan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rakjat Indonesia mendirikan suatu Pemerintah Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menudju kemenangannya”.



Rp. 35,—

Sampul ditjetak di P.I.R. — 608/62 — 10.000 ex.

Isi ditjetak di Persatuan 522/62